



Orasi Ilmiah Guru Besar IPB

---

Kebijakan Makroekonomi  
Berbasis Mikro

---

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
Institut Pertanian Bogor

Auditorium Rektorat, Gedung Andi Hakim Nasoetion, 10 Oktober 2009

---

**ORASI ILMIAH GURU BESAR  
DALAM RANGKA DIES NATALIS IPB KE-46**

**KEBIJAKAN MAKROEKONOMI BERBASIS MIKRO**

**ORASI ILMIAH**

**Guru Besar Tetap  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen**

**Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.**

**Auditorium Rektorat, Gedung Andi Hakim Nasoetion  
Institut Pertanian Bogor  
10 Oktober 2009**

## Ucapan Selamat Datang

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat,

Rektor IPB

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB

Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB

Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB

Para Pejabat Negara

Para Wakil Rektor, Dekan dan Pejabat di lingkungan IPB

Rekan-rekan Dosen, Alumni, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

Keluarga dan para undangan yang saya muliakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan perkenan-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB ke-46. Dalam suasana penuh khidmat ini, izinkanlah saya sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

### **“Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro”**

Topik orasi ini merupakan refleksi pembelajaran dan kiprah akademik yang saya tempuh selama ini. Ia membentang di tataran mikro dan makro daripada ilmu ekonomi. Mikro dan makroekonomi tidak dapat dipisahkan, baik dalam aspek teori maupun aspek empiris. Kebijakan makroekonomi seharusnya disusun setelah mempertimbangkan secara komprehensif detil di tataran mikro. Semoga kontribusi yang sederhana ini bermanfaat bagi hadirin dan menjadi penambah bagi ilmu ekonomi dan studi pembangunan, yang masih tergolong muda di Institut Pertanian Bogor.

FOTO ORATOR



**Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.**

## Daftar Isi

Ucapan Selamat Datang.....	iii
Foto Orator.....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
Pendahuluan .....	1
Landasan Teori.....	3
Paradigma <i>New Classic</i> dan <i>Real Business Cycle</i> .....	3
Paradigma <i>Keynesian</i> dan <i>New Keynesian</i> .....	5
Paradigma <i>Monetarism</i> .....	9
Perlunya “Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro” dan Kendala yang Dihadapi .....	11
Mengapa Harus “Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro”?.....	11
Kendala-Kendala terhadap Kebijakan Makro- ekonomi Berbasis Mikro.....	15
Kebijakan Makroekonomi untuk Peningkatan Ketahanan Krisis Finansial Global dan Fluktuasi Harga-Harga Pangan.....	19
Pengaruh KFG terhadap Ketahanan Pangan dan Respons Kebijakan yang Diharapkan .....	22
Kesimpulan dan Saran .....	28
Daftar Pustaka .....	31
Ucapan Terima Kasih.....	36
Foto Keluarga.....	41
Riwayat Hidup .....	42

## Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1.1. Nilai RCA paprika (HS 070960) beberapa negara tahun 2004-2008.....	2
Gambar 4.1. Indeks harga-harga Komoditas di Pasar Internasional, 2007-2009 .....	21
Gambar 4.2. Persentasi Pengeluaran Pemerintah Indonesia, 2001-2007.....	24
Gambar 3.1. Analisis <i>Forecast Error Variance Recomposition Nodel SVAR</i> Indonesia (%).....	13
Gambar 4.1. Stok Pangan Dunia 2006/2007-2007/2008 (Juta Ton) .....	22

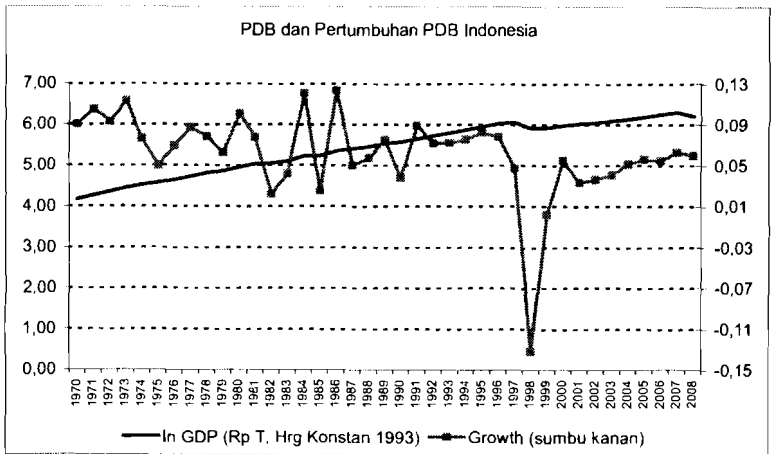
## Pendahuluan

Dalam pandangan ilmu makroekonomi modern, *business cycle* dimaknai sebagai deviasi PDB dari komponen *trend*-nya (Lucas, 1976; Blanchard and Fischer, 1989). Umumnya PDB mengandung *trend* positif, sehingga walaupun dalam jangka pendek PDB turun-naik, dalam jangka panjang PDB tersebut cenderung terus meningkat (lihat Gambar 1.1). Kajian-kajian *business cycle* “modern” menelaah pengaruh relatif dari setiap guncangan eksogen (*exogenous shocks*), misalnya mana yang lebih penting pengaruh guncangan moneter atau guncangan fiskal, bagaimana respons dinamis variabel-variabel endogen terhadap setiap guncangan eksogen.

Bila terjadi fluktuasi perekonomian yang relatif besar, haruskah pemerintah berupaya menstabilkannya dengan menerapkan kebijakan makroekonomi tertentu atau membiarkannya? Apa yang akan terjadi dengan perekonomian dan respons masyarakat terhadap pemerintah apabila otoritas-otoritas perekonomian tidak membuat kebijakan apa-apa sesaat setelah terjadinya Krisis Finansial Asia (KFA) 1997 atau Krisis Finansial Global (KFG) 2008? Apa yang akan terjadi dengan perekonomian dan bagaimana dampaknya terhadap rumah tangga apabila pemerintah tidak membuat kebijakan apa-apa di saat pengangguran tinggi dan cenderung bertambah? Krisis dan masalah makroekonomi harus diatasi. Di level mikro, jika terjadi masalah serius mengenai rendahnya kinerja perusahaan, maka otoritas perusahaan itu mencari dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Di level makro pun demikian, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan manajemen yang prudent agar makroekonomi bergerak ke arah yang diharapkan.

Terlebih-lebih bagi *small open economy* seperti Indonesia, di mana guncangan eksternal—maupun guncangan internal—bisa timbul dan menjalar masuk secara cepat hingga

mempengaruhi pelaku ekonomi di level mikro, dibutuhkan kebijakan makroekonomi yang dapat meredam dampak negatif guncangan tersebut (*counter-cyclical policy*). Mengingat pelaku usaha Indonesia usaha mikro dan kecil, yakni 99,8 persen dari total unit usaha dan menyerap 88,7 persen dari total tenaga kerja serta menghasilkan sekitar 40,7 persen dari PDB dan bahkan 46,0 persen dari PDB non-migas (Siregar, 2006), maka “dukungan kebijakan” memang merupakan hal yang wajar. *Activist policy*, sebagaimana hal ini biasa disebut dalam literatur makroekonomi, dibutuhkan tidak saja untuk meredam dampak negatif dari guncangan-guncangan ekonomi yang sedang terjadi, namun juga untuk mendukung kestabilan bahkan untuk mendorong kemajuan menuju apa yang dikatakan oleh Dornbusch, Fischer, dan Startz (2004) *predicted state of the economy*.



Sumber: BPS (Berbagai Tahun, diolah)

Gambar 1.1. PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1970-2008

Perlu kita ingat bahwa tidak semua ekonom, baik di perguruan tinggi maupun di birokrasi, sepandangan mengenai *policy*



*activism*. Hal ini sangat bergantung pada mazhab pemikiran ekonomi yang dianut. Kalau pun ekonom mendukung dilakukannya *activist policy*, timbul pertanyaan bagaimana *nature* dari kebijakan makroekonomi tersebut? Adakah ia dirumuskan dengan terlebih dahulu memperhatikan persoalan-persoalan terkait yang tengah dan akan terjadi di tataran mikro (*micro-founded policy*), ataukah ia dirumuskan terutama demi kestabilan makroekonomi semata—dengan asumsi bila makroekonomi stabil, maka persoalan-persoalan mikro dengan sendirinya akan selesai? Sebelum mengulas hal ini, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa mazhab pemikiran makroekonomi.

## Landasan Teori

Ada beberapa paradigma utama yang mengulas *business cycle* sebagai berikut.<sup>1</sup>

### Paradigma *New Classic* dan *Real Business cycle*

Makroekonomi *New Classic* mendasarkan telaahannya pada *rational expectations* dan pasar yang efisien, yakni pasar persaingan sempurna. Dalam pandangan mazhab ini, pilihan-pilihan kebijakan dibuat berdasarkan prinsip optimasi dengan asumsi pasar yang senantiasa berada pada keseimbangan dan tanpa eksternalitas. Makroekonom *New Classic* umumnya mendasarkan ulasan-ulasannya atas model *Real Business cycle* (RBC). Dalam pandangan RBC, fluktuasi makroekonomi berasal terutama dari guncangan teknologi (*technological shocks*). Setelah suatu guncangan mendera perekonomian, sehingga menjadi tidak-seimbang, keseimbangan selanjutnya dapat dicapai dengan mencari kondisi Pareto optimal. Oleh karena itu, dalam pandangan RBC, fluktuasi perekonomian sesungguhnya merupakan respons optimal dari pelaku ekonomi terhadap guncangan eksogenus yang bersifat riil.

<sup>1</sup>Pemaparan pada Bab ini sebagian besar disadur dari Siregar (2001).

Fluktuasi makroekonomi menurut teori RBC dimunculkan oleh dua gaya yang berbeda, yaitu mekanisme impuls dan mekanisme propagasi. Impuls ialah mekanisme awal yang mendorong suatu variabel terdeviasi dari kondisi *steady state*-nya, sedangkan mekanisme propagasi ialah gaya yang menyebabkan deviasi dari kondisi *steady state*, terus berlangsung untuk sekian lama. Mekanisme impuls utama dalam pandangan teori RBC ditimbulkan oleh guncangan teknologi. Adapun impuls lainnya seperti guncangan-guncangan yang berawal dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter atau guncangan-guncangan sisi permintaan dinilai memiliki pengaruh yang kecil terhadap *business cycle*.<sup>2</sup>

Mekanisme propagasi menurut RBC terjadi terutama melalui akumulasi kapital dan substitusi lintas-waktu *leisure* (McCallum, 1989; Romer, 2006). Melalui akumulasi kapital, lags dalam proses investasi dapat menghasilkan guncangan atau temuan teknologi saat ini yang akan memengaruhi investasi mendatang, yang berarti juga akan memengaruhi PDB mendatang. Melalui substitusi lintas-waktu *leisure*, guncangan yang terjadi akan meningkatkan produktivitas marjinal tenaga kerja, yang berarti meningkatnya upah riil. Kenaikan upah riil secara *transitory* membuat *leisure* menjadi lebih mahal, sehingga pelaku ekonomi meningkatkan jam kerjanya, dan implikasinya pada peningkatan *output*. Di saat upah riil turun ke posisi semula, *leisure* akan ditingkatkan kembali.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kebijakan makroekonomi yang relevan bagi ekonom *New Classic* terutama yang meyakini teori RBC hanyalah kebijakan teknologi atau yang memacu produktivitas kerja, yang menekankan kepada pertumbuhan jangka panjang. Fluktuasi makroekonomi jangka pendek cenderung diabaikan karena mekanisme propagasi

<sup>2</sup>Teoritis RBC tidak mengatakan bahwa guncangan-guncangan di sisi permintaan agregat sepenuhnya tidak relevan, namun sangat menekankan pentingnya guncangan-guncangan di sisi penawaran terutama teknologi dan produktivitas (Hall, 1990, p.122). Karena itu, RBC digolongkan sebagai teori sisi penawaran.

yang berlangsung akan mendorongnya untuk bergerak menuju keseimbangan jangka panjang (*steady state*). Namun, suatu ketika Keynes pernah mengatakan: “*in the long run, all of us dead!*”.

Banyak persoalan ekonomi jangka pendek yang secara ekonomi maupun politik tidak bisa diabaikan. Ini kritik pertama terhadap kebijakan makroekonomi yang dilandaskan pada mazhab *New Classic* atau *RBC*. Kritik selanjutnya ialah tidak ada bukti empiris yang kuat yang mampu membuktikan, bahwa fluktuasi maupun kemajuan makroekonomi yang terjadi sepenuhnya ditimbulkan oleh guncangan teknologi besar yang independen. Sebaliknya, terdapat bukti empiris kuat yang menyatakan bahwa dinamika *Total Factor Productivity*, yang dicerminkan oleh “*Solow residual*” tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh guncangan teknologi, mengindikasikan eksistensi guncangan selain teknologi (Romer, 2006). Hall (1987) misalnya menunjukkan, bahwa fluktuasi Solow residual di AS berkorelasi dengan partai politik Presiden yang memimpin, perubahan belanja pemerintah untuk pertahanan, dan fluktuasi harga minyak. Baumol, Litan, dan Schramm (2007) menjelaskan bahwa di dalam Solow residual juga terkandung guncangan penting lainnya, yaitu *entrepreneurship*. Kritik lainnya terhadap teori *RBC* ialah bahwa teori ini tidak dapat memprediksi terjadinya resesi karena dalam kerangka model *RBC*, hal tersebut membutuhkan penurunan teknologi di hampir seluruh sektor perekonomian.

### **Paradigma *Keynesian* dan *New Keynesian***

Mazhab *Keynesian* menekankan pentingnya guncangan sisi permintaan agregat. Para pengikut mazhab *Keynesian* mengkritisi ekonom-ekonom *New Classic* dengan mempertanyakan kemampuan pasar untuk berjalan secara efisien, mengingat harga-harga dan upah bersifat kaku atau tidak merespons guncangan makroekonomi secara sempurna.

Fluktuasi makroekonomi, dalam pandangan *Keynesian*, seyogianya distabilkan dengan menerapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di saat terjadi resesi, Pemerintah didorong untuk melakukan ekspansi fiskal, yakni dengan meningkatkan belanja atau menurunkan pajak. Di saat pertumbuhan tinggi, inflasi dikendalikan dengan menerapkan kontraksi fiskal, yaitu dengan menurunkan belanja atau meningkatkan pajak. Dalam kerangka *Keynesian*, tidak terdapat kaitan langsung antara bentuk kebijakan tersebut dengan struktur mikroekonomi. Karenanya, dampak dari penerapan kebijakan makroekonomi tidak dapat ditelusuri hingga tataran mikro.

Tidak terdapatnya kaitan eksplisit antara makroekonomi dengan tataran mikronya, atau diabaikannya *micro foundation* pada kerangka berpikir *Keynesian*, menyebabkan mazhab ini banyak dikritisi oleh pengikut mazhab *New Classic* yang memang menggunakan prinsip-prinsip mikroekonomi mengenai optimisasi (maksimisasi laba oleh perusahaan dan maksimisasi utilitas oleh konsumen) dan mengenai struktur pasar persaingan sempurna yang menekankan efisiensi alokasi sumberdaya. Selain itu, secara teoritis ada beberapa kelemahan pendekatan *Keynesian*, yaitu asumsi kekakuan atau tetapnya harga-harga dan upah, tidak adanya perbedaan jangka pendek dengan jangka panjang, serta kurangnya penekanan terhadap uang sebagai sumber ketidakstabilan permintaan agregat (Hall, 1990). Kelemahan-kelemahan ini, termasuk diabaikannya *micro foundation* tersebut di atas, diatasi oleh para ekonom *New Keynesian* (NK).

Mazhab NK sampai batas tertentu menjawab kritik *New Classic* dengan mengembangkan pondasi mikroekonomi yang absen pada mazhab *Keynesian*, yaitu dengan menunjukkan bagaimana pasar yang tidak sempurna bisa menjustifikasi pengelolaan permintaan agregat. Seperti halnya *New Classic*, ekonom NK umumnya berasumsi, bahwa pelaku ekonomi memiliki *rational expectations*. Namun, kedua mazhab ini

berbeda dalam hal di mana pada analisis NK diasumsikan terjadi kegagalan pasar. Harga-harga dan upah diasumsikan kaku atau tidak berespons secara cepat terhadap guncangan. Kegagalan pasar dan kekakuan harga-harga dan upah menyebabkan makroekonomi tidak dapat mencapai tingkat *full employment*. Oleh sebab itu, ekonom NK menyatakan bahwa campur tangan pemerintah berupa kebijakan fiskal oleh pemerintah dan kebijakan moneter oleh bank sentral dapat digunakan untuk mencapai kinerja ekonomi yang lebih efisien dibandingkan dengan yang dapat dicapai oleh pendekatan *laissez faire*—serahkan semuanya kepada pasar.

Dalam teori NK, diasumsikan bahwa harga-harga dan upah fleksibel dalam jangka panjang, namun kaku dalam jangka pendek.<sup>3</sup> “*Nominal rigidities*” inilah yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek dari variabel-variabel riil. *Nominal rigidities* terjadi karena terdapat insentif seperti: (a) “*menu cost*”, yaitu biaya tetap untuk menyesuaikan harga nominal yang sebetulnya kecil, tapi kerap menjadi pertimbangan pengusaha sebelum melakukan penyesuaian harga, dan (b) “*mark up pricing*” yang mencegah harga-harga menjadi sepenuhnya fleksibel dalam jangka pendek. Apabila harga *output* tidak sepenuhnya fleksibel dalam jangka pendek, maka guncangan nominal misalnya ekspansi moneter dapat meningkatkan harga *output* dengan proporsi yang relatif lebih kecil dibandingkan perubahan uang beredar. Dengan adanya kontrak, upah nominal bersifat tetap, sehingga ekspansi moneter tersebut menyebabkan upah riil, yaitu rasio upah nominal terhadap harga *output* menurun.<sup>4</sup> Penurunan

<sup>3</sup>Teori NK setuju terhadap *the natural rate hypothesis*, hipotesis di mana pertumbuhan *output* jangka panjang ditentukan semata-mata oleh variabel-variabel riil seperti perubahan teknologi, perubahan penawaran tenaga kerja, laju investasi, dan aturan-aturan kelembagaan (Friedman, 1968; Phelps, 1970). Dalam jangka pendek, variabel-variabel nominal—yakni pada sisi permintaan agregat—bisa juga memengaruhi *output* yaitu apabila pelaku ekonomi salah membuat ekspektasi harga-harga.

<sup>4</sup>Penjelasan lain terhadap nominal wage rigidity adalah “*staggered wage contracts*”, yaitu semua kontrak tidak habis dalam waktu yang bersamaan sebagaimana pertama sekali diked-

upah riil akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan menghasilkan lebih banyak *output*. Jadi campur tangan bank sentral dengan meningkatkan uang beredar (ekspansi moneter) dapat menimbulkan fluktuasi jangka pendek pada variabel riil, yaitu *output* dan tenaga kerja.

Selain *nominal rigidities*, faktor lain yang diasumsikan oleh para ekonom NK dalam melakukan analisisnya ialah ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, diasumsikan struktur pasar persaingan monopolistik. Dengan kekuatan monopolistik yang dimilikinya, perusahaan dapat mengenakan harga ( $P$ ) lebih tinggi daripada biaya marjinal ( $MC$ ), sehingga walaupun perusahaan tidak dapat menetapkan harga optimal, ia tetap dapat meraih keuntungan. Dalam struktur pasar yang demikian, perusahaan dapat mengenakan *mark up*, yakni:  $V = P/MC > 1$  (Rotemberg, 1986).

Secara empiris,  $V$  lebih besar dari satu,<sup>5</sup> menunjukkan bahwa pasar memiliki struktur persaingan tidak sempurna. Di dalam struktur ini fluktuasi perekonomian tidak hanya dipengaruhi oleh guncangan teknologi, tetapi juga oleh guncangan-guncangan lain. Misalnya, Hairault dan Portier (1993) memasukkan guncangan pertumbuhan uang, Spencer (1996, 1998) memasukkan guncangan permintaan agregat, dan Rotemberg dan Woodford (1995) memasukkan guncangan belanja pemerintah, guncangan *mark up*, dan guncangan terhadap jumlah produk-produk yang didiferensiasi di dalam pasar *output*.

Beberapa kritik yang ditujukan kepada teori NK antara lain ialah model-model NK sering bermasalah dalam hal konsistensi internal. Menurut Mankiw (1989), hal ini kemungkinan

---

mukakan oleh Taylor (1979).

<sup>5</sup> Hall (1987) menemukan bahwa di sejumlah industri di USA, dugaan nilai  $V$  berkisar antara 1.5 hingga 3, dan bahwa Solow residual bersifat prosiklikal. Divergensi  $P$  dari  $MC$ , atau  $V > 1$ , berarti terjadi persaingan tidak sempurna; sedangkan Solow residual yang bersifat prosiklikal, yakni produktivitas bergerak dengan arah yang sama dengan pergerakan *output*, menunjukkan terjadinya increasing returns to scale.

disebabkan oleh ditolakannya beberapa pondasi mikro, seperti aksioma bahwa pelaku pasar bersifat rasional dan senantiasa melakukan optimasi dalam pengambilan keputusan, sehingga membutuhkan aksioma yang ad hoc agar model yang dibangun sesuai dengan dunia nyata. Kritik berikutnya ialah bahwa model-model NK cenderung berkisaran luas, sehingga tidak dapat secara spesifik menentukan jenis guncangan penyebab fluktuasi makroekonomi. Namun demikian, elemen sentral teori NK ialah kekakuan harga dan upah nominal serta ketidak-sempurnaan pasar, sehingga guncangan nominal dapat memengaruhi variabel riil.

### **Paradigma *Monetarism***

Paradigma monetarisme meyakini bahwa inflasi selalu, dan di mana saja, merupakan fenomena moneter. Mazhab ini cenderung menolak kebijakan fiskal karena kebijakan fiskal dinilai menimbulkan *crowding out* pada sektor swasta. Lebih jauh lagi, paradigma monetarisme cenderung menolak kebijakan stabilisasi, misalnya memerangi inflasi maupun deflasi menggunakan kebijakan aktif di sisi permintaan agregat sebagaimana digunakan oleh *Keynesian*. Paradigma monetarisme menyatakan, bahwa ekspansi moneter yang besar akan menimbulkan inflasi tinggi, dan bahwa otoritas moneter harus fokus pada stabilisasi harga-harga semata.

Yang disarankan oleh monetaris ialah kebijakan moneter agar dibuat berupa *rules* yang menetapkan laju pertumbuhan uang beredar konstan lintas waktu, independen terhadap *business cycle*. Hal ini disebut "*Friedman's k-percent rule*". Dalam pandangan Friedman, bank sentral seharusnya dipaksa menetapkan pertumbuhan uang beredar dengan laju konstan yang ekuivalen dengan laju pertumbuhan PDB. Dengan cara ini, maka pelaku ekonomi dapat mengantisipasi keputusan-keputusan kebijakan moneter.

Karakteristik krusial dari model-model mazhab moneter

ialah uang dan kebijakan moneter dapat memengaruhi *output* terutama dalam jangka pendek. Friedman dan Schwartz (1963) menyatakan bahwa guncangan moneter merupakan penyebab utama fluktuasi makroekonomi, dan Friedman (1968, p.11) mengemukakan bahwa “*monetary policy can and does have important effects on real variables*”. Karena para monetaris, sebagaimana juga pengikut NK, setuju dengan *natural rate hypothesis*, maka efek tersebut dipandang tidak berlangsung pada jangka panjang melainkan secara transitori atau dalam jangka pendek saja. Perbedaan utama pandangan monetarisme dengan ekonom *New Classic* atau RBC terletak pada arah kausalitas uang-*output*. Seperti dikemukakan di atas, monetaris memandang uang memengaruhi *output*, sedangkan *New Classic* melihat *output* lah yang memengaruhi uang—hal yang dikenal sebagai “*reverse causation*”.

Baik monetaris maupun ekonom NK sepandangan dalam hal uang memengaruhi *output* dalam jangka pendek. Perbedaan utama antara kedua mazhab ini ialah bahwa pada model-model NK, *business cycle* dipengaruhi tidak hanya oleh guncangan kebijakan moneter atau uang, namun juga oleh guncangan permintaan agregat lainnya termasuk belanja pemerintah dan *mark up*, yang dampaknya terhadap variabel riil menjadi signifikan karena adanya kekakuan harga dan ketidaksempurnaan pasar. Adapun paradigma monetarisme, seperti telah dikemukakan di atas, mengabaikan kebijakan fiskal dan menekankan pentingnya kebijakan moneter.

Kritik terhadap paradigma monetarisme antara lain, yaitu konsistensi eksternal atau kinerja empiris model yang kurang memuaskan. Cho dan Cooley (1990), menggunakan data AS dalam membentuk model monetaris, menemukan bahwa harga-harga bersifat *pro-cyclical*, sementara pada kenyataannya harga-harga bersifat *counter cyclical*. Joyce dan Kamas (1997) menemukan bahwa kinerja empiris model monetaris untuk



data Meksiko dan Kolumbia tidak lebih baik dari model RBC. Menggunakan data New Zealand untuk membandingkan kinerja empiris model monetaris, model RBC, dan model NK, Siregar (2001) menemukan bahwa model NK memiliki kinerja empiris yang lebih baik dari kedua model lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma NK yang menggunakan pondasi mikro, mengenal kekakuan harga-harga dan ketidaksempurnaan pasar, mengenal berbagai jenis goncangan kebijakan, sehingga membuka kemungkinan campur tangan pengambil kebijakan, kiranya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis dalam konteks *micro-based macroeconomic policy* (Minford dan Peel, 2002).

## **Perlunya “Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro” dan Kendala Yang Dihadapi**

### **Mengapa “Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro”?**

#### **1. Alasan Teoritis**

Kebijakan dibuat untuk mengatasi persoalan. Di saat terjadi resesi diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif supaya perekonomian bisa keluar dari resesi. Di saat pertumbuhan ekonomi berlangsung luar biasa cepat dibutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang kontraktif supaya inflasi yang tinggi dapat ditekan dan dikendalikan. Akan tetapi, dampak pada tataran mikro dari penerapan kebijakan tersebut tidaklah kita ketahui, kecuali bila perumusan kebijakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan secara langsung kondisi di tataran mikro.

Konsekuensinya, bila kebijakan tersebut formulasinya berangkat dari suatu model makroekonomi, maka hendaklah model tersebut yang memiliki pondasi mikro. Tidak hanya itu,

pondasi mikro yang digunakan juga harus yang berkesesuaian dengan kondisi realitas. Pondasi mikro yang berasumsikan pasar persaingan sempurna seperti penguasaan informasi yang sempurna dan simetris, harga-harga yang sepenuhnya fleksibel, mobilitas sumberdaya yang sempurna, tidak terdapat eksternalitas serta berbagai ketidaksempurnaan lainnya tentu tidak cocok untuk perekonomian di mana asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi semua ataupun sebagiannya. Sebaliknya, model dengan pondasi mikro yang mengakomodir berbagai ketidaksempurnaan yang ada di realita, maka model itulah yang lebih cocok digunakan sebagai landasan berpikir untuk menyusun kebijakan. Bab terdahulu telah menunjukkan bahwa yang relatif lebih cocok dengan realitas adalah mazhab NK.

## **2. Endogenitas Variabel Kebijakan**

Bagi para monetaris, kebijakan moneter—yang instrumen kebijakannya umumnya ialah uang atau *base money*—memengaruhi PDB. Kebijakan moneter ditempatkan sebagai variabel eksogen, PDB sebagai variabel endogen. Berbagai hasil kajian empiris justeru menemukan endogenitas dari kebijakan moneter, seperti King dan Plosser (1984), Sims dan Zha (1998), Bernanke dan Blinder (1992), serta Siregar dan Ward (2002). Artinya, justeru *output* atau variabel ekonomi lainnya yang memengaruhi instrumen kebijakan moneter dari pada yang sebaliknya. Pada Tabel 3.1 ditunjukkan bahwa kebijakan moneter, yang variabel instrumen kebijakannya ialah suku bunga domestik jangka pendek, ternyata berespons terhadap guncangan keseimbangan pengeluaran (*balance of payments*). Hampir 75 persen variasi variabel instrumen kebijakan tersebut dalam periode 8 triwulan ke depan dipengaruhi oleh guncangan tersebut. Sementara guncangan kebijakan moneter domestik hanya mampu memengaruhi variasi *output* di bawah 3 persen.

Tabel 3.1. Analisis *Forecast Error Variance Decomposition Model SVAR* Indonesia (%)

	Triwulan Ke Depan	Goncangan Terhadap <sup>a</sup>			Variabel-variabel Domestik
		Kebijakan Moneter Domestik	Keseimbangan Pengeluaran	Kebijakan Moneter Luar Negeri	
Output	1	0.0 (n.a.)	0.0 (n.a.)	0.0 (-)	100
	4	0.4 (0.7)	41.0 (9.9)	0.3 (1.2)	59
	8	1.6 (3.0)	59.0 (15.2)	0.4 (2.2)	41
	16	2.8 (5.8)	53.8 (16.9)	2.2 (6.1)	44
	30	2.8 (6.0)	55.9 (18.8)	2.0 (5.8)	42
Suku Bunga Dom. J. Pendek	1	93.0 (6.5)	0.0 (-)	3.7 (4.8)	96
	4	31.9 (7.2)	53.8 (9.0)	1.5 (1.6)	45
	8	12.8 (5.3)	74.8 (8.4)	3.0 (5.2)	22
	16	12.9 (7.0)	58.1 (13.6)	6.9 (8.0)	35
	30	9.7 (6.3)	57.4 (15.0)	13.1 (11.0)	30

Sumber: Siregar dan Ward (2002).

Keterangan: a. Angka dalam tanda kurung adalah standard error. Tanda (-) menunjukkan *standard error* yang sangat kecil, dan n.a. menunjukkan goncangan terhadap suatu variabel yang tidak memiliki dampak *contemporaneous* (*by construction*) terhadap *variabel endogenus* tertentu.

Endogenitas dari kebijakan moneter menandakan bahwa otoritas moneter berespons terhadap gejolak yang terjadi pada perekonomian. Gejolak tersebut bisa jadi bersumber dari guncangan pada makroekonomi, seperti pada PDB ataupun pada nilai tukar rupiah. Namun, ia juga boleh jadi bersumber dari guncangan pada tataran mikro, seperti keputusan tak terduga yang diambil oleh satu konglomerasi pada industri dengan struktur pasar oligopolistik. Karena posisinya yang oligopolis, maka keputusan itu secara signifikan dapat memengaruhi harga produk industri tersebut serta harga surat-surat berharga konglomerasi itu maupun perusahaan-perusahaan lainnya pada industri yang sama, sehingga berdampak signifikan terhadap indeks di bursa. Demikian pula bila terjadi guncangan negatif pada sisi penawaran, semisal kegagalan panen, terhadap subsektor pangan, produksi pangan akan menurun secara signifikan sehingga harga pangan naik dan meningkatkan inflasi serta mungkin dapat meningkatkan kemiskinan.

Goncangan-goncangan pada tataran mikro, yang bisa berkontribusi cukup besar terhadap industri, bursa, sektor bahkan perekonomian, seyogyanya direspons dengan wajar oleh otoritas. Manakala harga pangan dan kemiskinan sudah bisa diperkirakan akan meningkat, maka selayaknya otoritas moneter dan otoritas fiskal menerapkan kebijakan yang bersifat *counter-cyclical*. Ekspansi moneter yang disusun secara terkoordinasi dengan ekspansi fiskal dirumuskan dengan langsung mempertimbangkan persoalan yang terjadi di tataran mikro. Inilah kebijakan makroekonomi berbasis mikro.

### **3. Beberapa Ketidakpastian**

Tidak semua guncangan yang terjadi harus direspons oleh pengambil kebijakan. Guncangan yang bersifat *transitory*, yaitu yang berdampak sangat singkat dan kecil terhadap perekonomian, tentu dapat diabaikan. Hanya guncangan

yang relatif permanen saja yang kiranya perlu direspons dengan kebijakan yang tepat. Persoalannya adalah pengambil kebijakan tidak mengetahui dengan pasti sejak awal, apakah sebuah guncangan bersifat *transitory* atau permanen.

Ketidakpastian tersebut masih ditambah lagi dengan beberapa ketidakpastian lainnya, yaitu pengambil kebijakan tidak tahu secara pasti kapan kebijakan tersebut mulai memberikan dampak dan berakhir dampaknya, serta seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Lebih jauh lagi, katakanlah guncangan yang terjadi diperkirakan bersifat permanen, persoalan berikutnya ialah pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya tidak mengetahui secara pasti transmisi kebijakan tersebut. Terdapat berbagai kemungkinan jalur, via mana mekanisme propagasi kebijakan akan berlangsung. Jalur-jalur tersebut mungkin dapat diperkirakan secara teoretis, namun secara empiris tidak dapat dipastikan.

Berbagai ketidakpastian tersebut perlu disikapi dengan cara mengidentifikasi sumber utama dari guncangan ekonomi yang terjadi dan dampak langsungnya terhadap perekonomian. Setelah itu, baru pembuat kebijakan menetapkan kebijakan makroekonomi yang secara “lebih langsung” dapat memengaruhi sumber guncangan maupun yang mampu meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya. Jika sumber guncangan terletak di tataran *grass root* ataupun sektoral, maka berbagai aspek mikro terkait dengan guncangan tadi beserta prakiraan dampaknya harus ditelaah dengan baik sebelum kebijakan makro diformulasikan.

## **Kendala-kendala terhadap Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro**

### **1. Kendala Formal Perencanaan Kebijakan Makro**

Pada praktiknya, kebijakan makroekonomi bisa jadi tidak berbasis mikro karena terkendala oleh aspek legal formal. UU

No.23/1999 dan UU No.3/2004 mengenai Bank Indonesia membatasi tujuan BI yaitu “mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI diberikan independensi yang mencakup: (a) independen dalam mencapai tujuan, (b) independen dalam menetapkan instrumen kebijakan, dan (c) independen dalam pemilihan gubernur (Sugiyono dan Ascarya, 2003). Dengan pembatasan tujuan tersebut, walaupun dinyatakan pada pasal 7 UU No.3/2004 bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi, otoritas moneter memiliki ruang yang relatif sempit untuk menjalankan kebijakan yang berbasis mikro.

Kebijakan moneter yang harus dijalankan dalam kerangka *inflation targeting* (IT) berarti menutup kemungkinan pemanfaatan langsung kebijakan tersebut untuk merespons masalah riil di tataran mikro, misalnya persoalan kekurangan pangan. Kegagalan panen menimbulkan kekurangan pangan dan pada gilirannya meningkatkan harga pangan, sehingga sangat potensial meningkatkan laju inflasi, mengingat cukup besarnya bobot harga-harga pangan dalam indeks harga konsumen. Dalam kerangka IT, kebijakan moneter yang dilakukan ialah menstabilkan harga-harga. Karena instrumen kebijakan moneter yang dipakai ialah suku bunga Bank Indonesia (SBI), maka stabilisasi tersebut dilakukan dengan meningkatkan SBI. Hal ini berpotensi meningkatkan suku bunga pinjaman, yang pada akhirnya dapat menghambat kredit untuk pengembangan usahatani pangan tersebut.

Pemerintah tidak dapat memengaruhi BI untuk melakukan ekspansi moneter dengan cara menurunkan SBI agar kredit untuk usahatani pangan bisa ditingkatkan secara signifikan,

karena independensi BI.<sup>6</sup> Bahkan untuk menyarankan agar merubah instrumen kebijakan moneter, yakni suku bunga, juga tidak bisa karena alasan independensi tersebut. Sekalipun beberapa kajian, misalnya Nuryati, Siregar, dan Ratnawati (2006) serta Siregar dan Ward (2002), telah menunjukkan bahwa suku bunga jangka pendek sebagai instrumen kebijakan moneter Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan.

Kendala lainnya ialah dalam menyusun kebijakan fiskal yang *counter cyclical*, umumnya dibutuhkan *inside lag* yang cukup panjang.<sup>7</sup> *Inside lag* untuk kebijakan fiskal yang “strategis” dan tidak bersifat darurat seringkali cukup panjang karena harus dibahas di parlemen. *Inside lag* yang cukup panjang ini bisa jadi menyebabkan kehilangan *timing* yang tepat agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang maksimal.

## 2. Pragmatisme dalam Perencanaan Kebijakan Makro

Pembahasan dengan DPR misalnya terkait anggaran belanja, selain cukup lama, bisa jadi menyebabkan adanya perubahan-perubahan besaran, sehingga menjadi cukup berbeda dibandingkan proyeksi awal yang disusun pemerintah. Oleh sebab itu, sekalipun proyeksi anggaran belanja sebetulnya sudah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi mikro sektoral, pembahasan tersebut bisa menyebabkan perubahan komposisi dan besaran anggaran. Terjadinya hal ini secara berulang-ulang dari tahun ke tahun akhirnya bisa mendorong timbulnya pragmatisme di dalam penyusunan rencana anggaran belanja, dengan alasan pragmatis bahwa rencana atau proyeksi

<sup>6</sup> Kredibilitas fiskal dapat dicapai antara lain melalui adanya independensi bank sentral. Namun, seperti dikemukakan Montiel (2003), mekanisme kelembagaan ini belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah maupun tercapainya inflasi yang rendah, sebab hal itu bergantung pada bagaimana bank sentral menjalankan independensinya.

<sup>7</sup> Time lags dalam kaitannya dengan kebijakan terdiri atas *inside lag* dan *outside lag*. *Inside lag* adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan, sedangkan *outside lag* merupakan waktu yang dibutuhkan agar kebijakan tersebut berdampak kepada perekonomian.

yang disusun pasti akan berubah saat pembahasan dengan parlemen, di pusat maupun di daerah.

Pada masa mendatang, kiranya diperlukan pembatasan terhadap perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan dalam pembahasan anggaran. Seperti yang diterapkan di Korea dan beberapa negara lain, pembahasan anggaran di parlemen tidak boleh mengubah *items* dari kegiatan dan tidak boleh meningkatkan besaran anggaran untuk setiap *items*.

### **3. Kendala Kelembagaan dalam Perencanaan Teknis**

Lembaga perencanaan mempunyai posisi sentral dalam menerapkan pendekatan “*micro-based macroeconomic policy*”. Dalam lingkup perencanaan nasional, lembaga tersebut adalah Bappenas. Bagian monitoring dan evaluasi pada lembaga tersebut berperan sangat penting dalam mengidentifikasi dan memformulasikan persoalan-persoalan tataran mikro yang tengah dan yang mungkin akan terjadi, apapun sektor ekonominya. Lembaga ini juga harus mampu memilah dan mengelompokkan berbagai persoalan tersebut, sehingga akhirnya bisa teridentifikasi beberapa persoalan kritical yang spesifik (Siregar, Widyastutik, dan Thamrin, 2007). Kebijakan dirancang untuk mengatasi persoalan kritis tersebut.

Satu persoalan kritical, sebagaimana digariskan oleh *Tinbergen's rule*, membutuhkan setidaknya sebuah instrumen kebijakan yang relevan (Hossain dan Chowdhury, 2001). Oleh karena itu, terhadap tiap persoalan kritik didesain sejumlah alternatif kebijakan makroekonomi. Dengan bantuan analisis simulasi kemudian akan bisa diketahui pilihan atau satu set pilihan kebijakan makroekonomi yang diperlukan.

Kendala yang sering muncul sejak saat melakukan identifikasi dan formulasi persoalan maupun dampak guncangan yang terjadi hingga menentukan pilihan kebijakan makroekonomi



yang akan dijalankan adalah koordinasi dengan kementerian terkait maupun dengan pemerintah daerah. Ada kesan bahwa keterkaitan antara Bappenas dengan instansi-instansi teknis tersebut menjadi relatif kurang erat setelah fungsi *budgeting* dikeluarkan dari Bappenas dan ditempatkan di Departemen Keuangan. Hal ini tidak seharusnya terjadi manakala instansi-instansi teknis menyadari pentingnya perencanaan teknis. Perencanaan teknis harus dilakukan secara serius bersama-sama Bappenas. Persoalan tersebut mungkin timbul karena yang lebih diperhatikan oleh instansi teknis adalah *budgeting*-nya, yang justru seharusnya didasarkan atas perencanaan teknis yang akurat.

## **Kebijakan Makroekonomi Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan: Sebuah Ilustrasi<sup>8</sup>**

Ketahanan pangan dipilih sebagai ilustrasi karena posisi strategisnya dalam pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Siregar (2008), ketahanan nasional bergantung pada ketahanan ekonomi; dan di antara pilar-pilar ketahanan ekonomi, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan finansial, dan ketahanan secara fisik, ketahanan pangan adalah yang paling penting sebab pangan bukan sekedar kebutuhan pokok, namun merupakan hak asasi.

Ketahanan pangan setidaknya memiliki tiga pilar, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, serta stabilisasi dan distribusi pangan. Ketiga pilar ini sama pentingnya. Namun, mengingat potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia, tampaknya penguatan ketahanan pangan melalui penguatan pilar ketersediaan, utamanya dengan cara peningkatan produksi, merupakan langkah yang paling tepat.

### **Krisis Finansial Global dan Fluktuasi Harga Pangan**

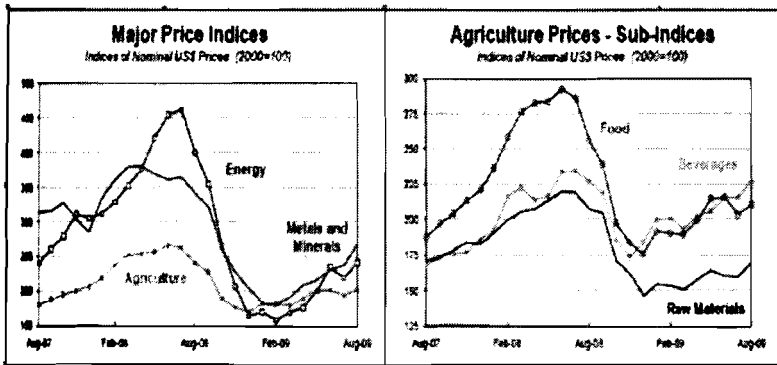
<sup>8</sup>Sebagian pemaparan pada Subbab 4.1 - 4.3 diambil dari Siregar (2008).

KFG bersumber dari negara-negara maju yang merupakan tujuan ekspor dan sumber *foreign direct investment* (FDI) Indonesia. Sektor finansial global mendapatkan guncangan besar sehingga menyebabkan timbulnya keketatan likuiditas (*liquidity squeeze*) dikarenakan kepercayaan publik yang turun drastis terhadap sektor keuangan global yang sejauh ini domisili dominannya di AS (Panzner, 2009). Keketatan likuiditas tersebut menyebabkan investor menarik dananya dari *emerging markets* ke pusat-pusat keuangan di AS dan beberapa negara industri lainnya, sehingga FDI negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan menurun. Resesi di AS dan negara-negara maju lainnya menyebabkan ekspor Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya ke negara-negara maju tersebut menurun. Sekalipun rupiah mengalami depresiasi, resesi di negara-negara tujuan ekspor tersebut masih tidak memungkinkan mereka untuk membeli produk Indonesia dalam volume yang lebih besar.

KFG juga berimplikasi pada semakin fluktuatifnya harga-harga komoditas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi prospek inflasi dalam negeri. Dapat dilihat pada Gambar 4.1, bahwa sampai dengan pertengahan 2008, semua komoditas mengalami kenaikan harga. Hal ini dipicu salah satunya oleh melambungnya harga minyak dunia yang ditunjukkan dengan kenaikan harga energi (minyak bumi) yang melampaui harga metal dan mineral serta pertanian. Setelah pertengahan 2008, harga energi menurun drastis. Penurunan harga energi, yang umum diperdagangkan di bursa berjangka internasional ini, mendorong penurunan biaya produksi di berbagai sektor, sehingga tingkat harga barang-barang lain termasuk pangan ikut turun.

Ada beberapa penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan fluktuatifnya harga pangan, selain stok pangan dunia yang relatif rendah (Tabel 4.1). Pertama, adanya

perubahan iklim. Saat-saat awal *global warming*, produksi pangan cenderung naik; setelahnya, produktivitas pertanian mengalami penurunan, sehingga produksi turun hingga 15 sampai 20 persen (Winoto dan Siregar, 2007).



Sumber: World Bank (2009).

Gambar 4.1. Indeks Harga-harga Komoditas di Pasar Internasional, 2007-2009

Perubahan iklim secara langsung menciptakan ketidakpastian produksi, sehingga dapat memicu kenaikan harga pangan. Kedua, kenaikan harga minyak bumi menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan biaya sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida. Akibatnya, harga produk pertanian dan pangan juga meningkat. Ghanem (2008) menghitung koefisien korelasi antara indeks harga pangan dan indeks harga energi sebesar 0,77.

Ketiga, kenaikan harga minyak dunia juga mendorong penggunaan energi alternatif, seperti *biofuel*, sehingga menciptakan kompetisi penggunaan sumberdaya (terutama lahan) untuk pangan vs. untuk feedstock (bahan baku) *biofuel*. Keempat, pertumbuhan ekonomi Cina dan India, dua negara dengan jumlah penduduk terbesar, menyebabkan peningkatan permintaan yang luar biasa terhadap bahan pangan. Kelima,

spekulasi di *commodity futures trading*. Konsekuensi dari keterbukaan ekonomi adalah negara-negara menjadi lebih terbuka, sehingga harus siap menghadapi terpaan krisis global. Bila Indonesia belum siap, maka perlu memperkuat dahulu fundamental ekonomi ketahanan pangan nasional hingga tingkat rumah tangga.

Tabel 4.1. Stok Pangan Dunia 2006/2007 – 2007/2008 (Juta Ton)

Komoditas	2006/2007	2007/2008	Perubahan (%)
Beras	75.627	72.174	-4.57
Jagung	106.173	109.060	2.72
Kedelai	61.108	47.316	-22.57
Gandum*	125.606	110.400	-11.72

Sumber : USDA (2007).

Keterangan: \* tahun kalender 2006 dan 2007.

### **Pengaruh KFG Terhadap Ketahanan Pangan dan Respons Kebijakan yang Diharapkan**

Penurunan ekspor dan FDI yang ditimbulkan oleh KFG menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran, mengurangi daya beli, dan menaikkan kemiskinan yang pada gilirannya menyebabkan akses masyarakat terhadap pangan turun (pilar akses dari ketahanan pangan). Pada sisi lain, rendahnya harga pangan berakibat pada menurunnya supply dan ketersediaan pangan (pilar ketersediaan ketahanan pangan). Fluktuasi harga komoditas mengganggu stabilitas dan distribusi pangan (pilar stabilitas dan distribusi ketahanan pangan).

Terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan produktivitas pertanian mengalami penurunan, sementara stok cenderung tetap bahkan berkurang, akan berakibat pada tingginya harga-

harga produk pertanian khususnya harga-harga bahan pangan. Bila ini terjadi, sementara daya beli masyarakat tetap—apalagi turun, akan berakibat pada sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akibatnya, terjadi kelaparan dan persoalan-persoalan lain yang terkait dengan masalah tersebut.

Respons kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di atas dapat dikelompokkan dalam sektor-sektor sebagai berikut.

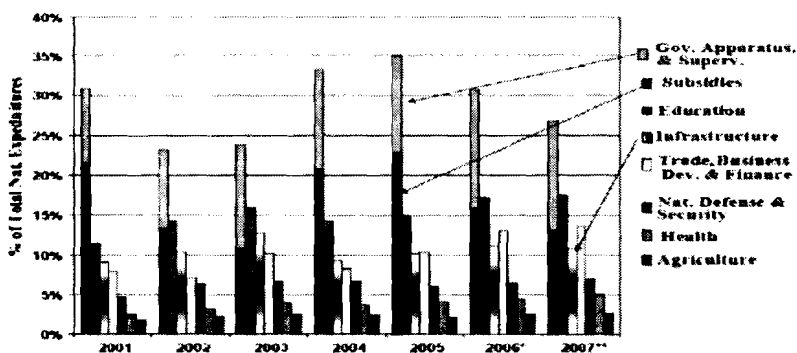
### **1. Kebijakan Sektor Pertanian/ Pangan**

Salah satu ancaman nyata terhadap ketahanan pangan ialah semakin tingginya konversi lahan pertanian ke non-pertanian, terutama di kawasan pedesaan yang relatif dekat ke perkotaan (Winoto dan Siregar, 2006). Pencegahan konversi lahan pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara; pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya multifungsi lahan pertanian, sehingga lebih menyadari risiko yang harus ditanggung apabila konversi lahan dibiarkan berlanjut. Kedua, mengkaji ulang peraturan (perundangan) yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan. Ketiga, meningkatkan peran nyata pemerintah daerah untuk mengembangkan, atau setidaknya mempertahankan, lahan usahatani tanaman pangan. Keempat, membantu petani dalam sertifikasi lahan pertanian, di mana dengan label “pertanian” tersebut lahan tidak diperbolehkan untuk dikonversi.

Pencetakan sawah atau lahan pertanian pangan baru merupakan upaya lain untuk mengatasi ancaman terhadap ketahanan pangan. Upaya ini membutuhkan anggaran yang besar, namun sebaiknya jangan ditunda lagi pelaksanaannya. Pencetakan sawah seyogianya dilakukan di luar Pulau Jawa, di mana kompetisi penggunaan lahan antara pangan atau pertanian dengan non-pertanian tidak signifikan, di samping lebih efektif secara biaya.

Upaya yang lebih bersifat jangka panjang untuk mengatasi ancaman terhadap ketahanan pangan ialah peningkatan riset dan pengembangan. Khusus untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan yang berasal dari *global warming*, upaya yang seyogianya dilakukan sejak saat ini dan secara sistematis ke depan ialah mengembangkan varietas-varietas pangan yang tahan terhadap cuaca atau yang ekstrim. Varietas-varietas dimaksud hendaklah dikembangkan spesifik lokasi.

Keseluruhan upaya tersebut akan efektif diimplementasikan apabila tersedia infrastruktur pertanian yang memadai. Gambar 4.2 menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur cenderung fluktuatif pada kisaran sekitar 10 persen dari belanja total. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur ini dipandang



masih perlu lebih besar lagi, karena yang dialokasikan saat ini baru sekitar 3 persen dari PDB.

Sumber: World Bank (2007).

Gambar 4.2. Persentase Pengeluaran Pemerintah Indonesia, 2001-2007

## 2. Kebijakan Sektor Keuangan

Banyak alternatif kebijakan keuangan yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat mendukung sektor riil. Salah satu yang telah dan tengah dilaksanakan ialah melalui pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan bagian dari

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) berskala mikro. Pengembangan LKNB berskala mikro dapat menunjang kebutuhan kredit bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak dibidang pangan yang belum *bankable* sehingga dapat mendukung ketahanan pangan. Termasuk dalam LKNB ini misalnya Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM), yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negara PT PNM (Persero), yang karena bukan bank maka tidak harus mengikuti persyaratan prudential banking sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Perbankan.

### 3. Kebijakan Sektor Perdagangan

Kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah pada sektor perdagangan, antara lain melakukan penghapusan hambatan perdagangan antardaerah, meningkatkan kerjasama perdagangan khususnya pangan di kawasan ASEAN serta melakukan proteksi dengan justifikasi yang kuat (*justified protection*) bagi pertanian dan pangan Indonesia.<sup>9</sup> Di antara justifikasi tersebut ialah bahwa pangan adalah hak asasi manusia, sehingga ketersediaan dan ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan yang posisinya di atas kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional.

Menurut Stiglitz (2007): “*OECD countries continue to subsidize agriculture by 48% of total farm production, just 3% lower than 1986, and maintain high tariffs*”. Jika para negara maju itu memproteksi pertaniannya dalam bentuk subsidi, mengapa negara berkembang termasuk Indonesia—yang terbatas dananya untuk memberikan subsidi—tidak menerapkan proteksi pada tingkatan yang dipandang efektif untuk melindungi para petani dan ketahanan pangannya?

<sup>9</sup>Stiglitz (2006) menekankan pentingnya perdagangan yang adil daripada perdagangan bebas, terutama dalam bidang pertanian. Dikemukakannya bahwa 1 persen dari total lahan pertanian dunia, yakni di negara-negara maju, menerima hampir 25 persen dari total subsidi yang dikeluarkan. Sekitar 87 persen dari subsidi tersebut dinikmati para petani kaya yang jumlahnya hanya sekitar 20 persen dari total jumlah petani dunia. Subsidi yang besar tersebut, beserta subsidi non-perdagangan, menurut Stiglitz mengakibatkan tersingkirnya petani kecil terutama di negara-negara berkembang.

#### **4. Kebijakan Pemerintah Daerah**

Timmer (2008) menekankan bahwa pencapaian dan keberhasilan memelihara ketahanan pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun tingkat nasional, akan menghasilkan penurunan kemiskinan dan pengurangan insiden kelaparan. Pemerintahan yang berhasil, menurut Timmer, adalah pemerintahan yang mampu mendukung ketahanan pangan untuk warga negaranya. Penurunan kemiskinan itu sendiri akan berhasil hanya jika ada kesanggupan politis dasar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan juga merata distribusinya. Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kondisi yang kondusif seperti kestabilan makroekonomi, termasuk harga bahan pangan yang relatif stabil.

Akhir-akhir ini, produksi atau ketersediaan beberapa komoditas pangan Indonesia telah menunjukkan kecenderungan meningkat. Akan tetapi, kebutuhan atau konsumsi pangan juga meningkat seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Maka, pemerintah terutama Pemda-pemda—di mana usahatani pangan dan UMK yang bergerak dalam pengolahan pangan sesungguhnya berada—seyogianya menjadikan ketahanan pangan sebagai program pokok. Memperkuat ketahanan pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan secara sistematis produksi atau ketersediaan pangan. Ekstensifikasi usahatani pangan hendaknya dilakukan oleh Pemda-pemda di luar Pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia, di mana terdapat potensi lahan yang besar dan memiliki kesesuaian agroklimat untuk berbagai komoditas pangan. Intensifikasi usahatani pangan seyogianya dilakukan di kawasan dengan lahan yang relatif sudah langka terutama di Jawa dan Sumatera. Selain hal tersebut, Pemda juga harus serius dan aktif menerapkan upaya-upaya peningkatan daya beli masyarakatnya, agar akses mereka ke pangan semakin meningkat.



## 5. Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Menghadapi KFG dan dampak yang mungkin ditimbulkannya, pemerintah seharusnya menempuh kebijakan ekspansi fiskal untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dikemukakan. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, terapkan program padat karya di pedesaan, terutama pada saat off-season. Kondisi kawasan pedesaan pada umumnya dicirikan oleh masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, rendahnya kualitas lingkungan perumahan, terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat, serta lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi dan keterkaitan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Kegiatan ekonomi utama di kawasan pedesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis sumberdaya lokal.

Program padat karya di pedesaan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengembangan prasarana dan sarana desa, peningkatan fasilitas penunjang bagi lembaga keuangan pedesaan dan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi. Bila program tersebut dapat dijalankan secara efektif, maka pada putaran pertama ia dapat mengatasi masalah pengangguran; pada putaran kedua, ia menciptakan perluasan kesempatan kerja pedesaan, terutama pada kegiatan-kegiatan off-farm berskala mikro dan kecil, sehingga berdampak pada berkurangnya kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan. Jika hal ini diiringi dengan pemantapan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa, maka kemajuan yang dicapai dapat dijaga keberlanjutannya.

Kedua, program padat karya di perkotaan. Program padat karya di perkotaan dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya. Dalam kaitannya

dengan dunia usaha dan pangan, bentuk-bentuk penyediaan dimaksud hendaklah fokus pada usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang pangan. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap pangan, program padat karya dapat dikombinasikan dengan program jaminan kerja umpamanya 100 hari. Semua angkatan kerja yang terdaftar, dijamin untuk bekerja minimal 100 hari dalam satu tahun. Pemda mengidentifikasi sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan ataupun dipelihara, lalu angkatan kerja direkrut untuk mengerjakannya.

Selain itu, perlu pula diberikan insentif pajak yang berpihak kepada petani dan pelaku UMK di bidang pangan. Dengan insentif yang wajar, diperkirakan produksi pertanian dan pangan dapat dijaga peningkatannya. Tanpa insentif pajak, konversi lahan pertanian ke kegiatan-kegiatan non-pertanian juga sulit untuk dikendalikan.

Akan halnya kebijakan moneter berkerangka *inflation targeting* dan independensi BI yang relatif tinggi, kebijakan ini sulit digunakan untuk secara langsung mendukung ketahanan pangan. Upaya BI mencapai tujuan yang diamanatkan kepadanya, yaitu inflasi yang rendah dan terkendali, dilakukan dengan menerapkan suku bunga BI yang relatif tinggi. Akibatnya, investasi rendah, sehingga kurang mendukung akselerasi sektor riil termasuk peningkatan ketahanan pangan.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Mazhab ekonomi yang diyakini oleh penentu kebijakan diperkirakan dapat memengaruhi apakah pendekatan kebijakan yang akan ditempuhnya berbasis mikro atau tidak. Diperkirakan penentu kebijakan yang meyakini mazhab Monetarisme dan Keynesian cenderung tidak menggunakan pendekatan *micro based macroeconomic policy (MiBMaP)*. Penentu kebijakan yang berkeyakinan *New Classic* maupun yang berkeyakinan

*New Keynesian* cenderung akan menggunakan pendekatan MiBMaP. Ekonom *New Keynesian* menggunakan asumsi-asumsi yang lebih sesuai dengan realitas dan meyakini efektifitas guncangan kebijakan di sisi permintaan dan sisi penawaran.

Hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa fluktuasi ekonomi atau *business cycle* bisa dijelaskan secara lebih baik oleh model yang berlandaskan teori NK. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan MiBMaP lebih baik dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Selain justifikasi teoritik beserta hasil-hasil penelitian tersebut, terdapat pula alasan-alasan empirik agar digunakannya pendekatan MiBMaP, yaitu endogenitas variabel kebijakan makro-ekonomi dan beberapa ketidakpastian berkenaan dengan karakteristik guncangan penyebab fluktuasi dan jalur transmisi guncangan tersebut. Keseluruhan ini “mengkondisikan” agar penetapan kebijakan makroekonomi seharusnya dilakukan berbasis mikro.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pendekatan MiBMaP urung dilakukan, yaitu adanya kendala legal yang membatasi cakupan kebijakan moneter dan kendala formal yang mengharuskan otoritas fiskal meminta persetujuan DPR sebelum anggaran ditetapkan, sehingga menimbulkan *inside lag*. Kendala berikutnya ialah munculnya pragmatisme dalam perencanaan kebijakan makro serta masalah koordinasi dalam perencanaan kebijakan teknis.

Dalam ilustrasi ancaman terhadap ketahanan pangan yang ditimbulkan oleh guncangan KFG akhir-akhir ini, diketahui bahwa guncangan tersebut berpengaruh negatif terhadap ketiga pilar KP. Dampak-dampak negatif tersebut perlu diatasi dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang relevan. Kebijakan-kebijakan tersebut membutuhkan kebijakan makroekonomi yang ekspansif, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sektoral dapat dilaksanakan secara efektif. Tumpuan besar diletakkan pada kebijakan fiskal.

## Saran

Kebijakan moneter dalam kerangka *inflation targeting*, yang direncanakan serta dilaksanakan secara independen oleh BI, kiranya perlu dievaluasi. Social benefit-cost analysis terhadap kebijakan tersebut perlu dilakukan secara akurat. Atas dasar hasil analisis tersebut diharapkan dapat dilakukan berbagai penyempurnaan termasuk dalam hal kerangka kebijakan moneter yang mungkin lebih tepat, instrumen kebijakan moneter yang lebih efektif, dan mekanisme penetapan sasaran kebijakan moneter yang lebih tepat.

Agar pendekatan MiBMaP dapat dilakukan secara efektif, maka koordinasi dalam berbagai tahap penyusunan perencanaan teknis antara Bappenas dan Departemen/ Kementerian terkait harus diperkuat. Proses perencanaan yang artifisial, dalam arti tidak melalui pembahasan teknis secara substantif dan mendalam, harus dihindari. Identifikasi dan formulasi masalah hendaknya dilakukan secara serius oleh Departemen/ Kementerian teknis, lalu dikomunikasikan dan dibahas dengan baik bersama Bappenas, sehingga solusi kebijakan-kebijakan sektoral serta kebijakan makroekonomi yang melingkupinya dapat ditetapkan secara baik.

Dalam mengatasi guncangan besar seperti KFG, pemerintah disarankan untuk fokus kepada persoalan yang dipandang paling kritis. Dampak negatif KFG terhadap KP, ditambah lagi dengan semakin terasnya peningkatan suhu global, diperkirakan cukup mendalam dan bercakupan luas di tataran mikro. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan KP patut untuk diprioritaskan. Agar upaya-upaya kebijakan sektoral maupun kebijakan makroekonomi berlangsung efektif, maka di setiap Departemen/ Kementerian terkait dengan KP dibutuhkan adanya bagian atau desk yang khusus memastikan bahwa instansi tersebut benar-benar mendukung KP sesuai dengan tupoksinya. Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh setiap desk.

## Daftar Pustaka

- Baumol, W.J., R.E. Litan, and C.J. Schramm (2007). *Good Capitalism, Bad Capitalism: And the Economics of Growth and Prosperity*. New Haven: Yale University Press.
- Bernanke, B.S. and A.S. Blinder (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. *American Economic Review*, 82(4), 901-21.
- Blanchard, O. and S. Fischer (1989). *Lectures on Macroeconomics*. Cambridge: The MIT Press.
- Cho, J.O. and Cooley, T.F. (1990). *The business cycle with nominal contracts*. Working Paper, University of Rochester.
- Dornbusch, R., S. Fischer, and R. Startz. (2004). *Macroeconomics*, 9th ed. Boston: McGraw Hill.
- Friedman, M. and A.J. Schwartz (1963). *A Monetary History of the United States, 1867-1960*. Princeton: Princeton University Press.
- Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *American Economic Review*, 58(1), 1-17.
- Ghanem, H. (2008). *High Food Prices and Food Security*, Presentation Material, FAO.
- Hairault, J,-O, and F. Portier (1993). *Money, New-Keynesian macroeconomics and the business cycle*. *European Economic Review*, 37, 1533-1568.
- Hall, R.E. (1987). Investment under uncertainty: theory and tests with industry data. NBER Working Paper, No.2264.
- Hall, T.E. (1990). *Business cycles: the nature and causes of economic fluctuations*. New York: Praeger.

- Hossain, A. and A. Chowdhury (2001). *Open-Economy Macroeconomics for Developing Countries*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Joyce, J.P. and L. Kamas (1997). The relative importance of foreign and domestic shocks to *output* and prices in Mexico and Colombia. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 133(3), 458-477.
- King, R.G. and C.I. Plosser (1984). *Money, credit, and prices in a Real Business cycle*. *American Economic Review*, 74(3), 363-380.
- Lucas, R.E. Jr. (1976). Econometric policy evaluation: a critique. In K. Bruner and A. Meltzer (Eds.) *The Phillips Curve and Labor Markets*. Amsterdam: North-Holland.
- Mankiw, N.G. (1989). *Real Business cycles: a New-Keynesian perspective*. *Journal of Economic Perspectives*, 3(3), 79-90.
- McCallum, B.T. (1989). *Real Business cycle models*. In Barro, R.J. (Ed.), *Modern Business cycle Theory*. Oxford: Basil Blackwell, 16-50.
- Minford, P. and D. Peel (2002). *Advanced Macroeconomics: A Primer*. Cheltenham : Edward Elgar.
- Montiel, P.J. (2003). *Macroeconomics in Emerging markets*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nuryati, Y., H. Siregar, dan A. Ratnawati (2006). Dampak Kebijakan *Inflation targeting* terhadap Beberapa Variabel Makro-ekonomi di Indonesia, *Bulletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan*, 9(1), 113-134.
- Panzner, M.J. (2009). *When Giants Fall: An Economic Roadmap for the End of the American Era*. New Jersey: John Wiley & Sons.

- Phelps, E.S. (1970). *Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory*. New York: Norton.
- Romer, D. (2006). *Advanced Macroeconomics*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- Rotemberg, J.J. (1986). The *New Keynesian* microfoundations. NBER Macroeconomics Annual, 1, 69-104.
- Rotemberg, J.J. and M. Woodford (1995). Dynamic general equilibrium models with imperfectly competitive product markets. In T.F. Cooley (Ed.), *Frontier of Business cycle Research*. Princeton: Princeton University Press.
- Spencer, D.E. (1996). Interpreting the cyclical behavior of the price level in the U.S. *Southern Economic Journal*, 63(1), 95-105.
- Spencer, D.E. (1998). The relative stickiness of wages and prices. *Economic Inquiry*, 36, 120-137.
- Sims, C.A. and T.A. Zha (1998). Does monetary policy generate recessions? Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, 98-12.
- Siregar, H and B. Ward (2001). Long Run *Money Demand*, Long Run Spending Balance and Macroeconomic Fluctuations: Application of a Cointegration SVAR Model to The Indonesian Macroeconomy. *Economy Internazionale*. Genova, 54(3): 401-424.
- Siregar, H. (2001). Empirical Evaluation of Rival Theories of The *Business cycle*: Application of Structural VAR Models to The New Zealand Economy [disertasi]. Lincoln University, New Zealand.
- Siregar, H. and B. Ward (2002). "Were Aggregate Demand Shocks Important in Explaining Indonesian Macroeconomic Fluctuations?", *Journal of the Asia Pacific Economy*, 7(1), 35-60.

- Siregar, H. (2006). Transformasi Struktural, Industrialisasi dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Makalah disajikan pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XVI, diselenggarakan oleh ISEI di Manado Convention Centre, Manado, 19 Juni.
- Siregar, H., Widyastutik, F.D. Thamrin (2007). Ekonomi Perencanaan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Siregar, H. (2008). Global Financial Crisis, Food Security, Expected Policy Responses and Local Economy Roles. In Hariyadi, P. (Ed.), Food Security: A Prerequisite of National Security. Bogor: SEAFASST Center, IPB.
- Sugiyono, F.X dan Ascarya (2003). Kelembagaan Bank Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Stiglitz, J.E. (2006). Making Globalization Work. New York: W.W. Norton.
- Stiglitz, J.E. (2007). What is the Role of the State? in Humphreys, M., Sachs, J.D., and Stiglitz, J.E. (eds) 2007, Escaping the Resource Curse. Columbia University Press, New York.
- Taylor, J. (1979). Staggered wage setting in a macro model. American Economic Review, 69(2), 108-113.
- Timmer, C.P. (2008). Poverty in Asia and the Transition to High-Priced Food Staples. IFPRI. Washington DC.
- USDA (2007). Grain, World Market, and Trade.
- Winoto, J. dan H. Siregar (2006), "Peranan Pembangunan Infra-struktur dalam Menggerakkan Sektor Riil", Jurnal Ekonomi Indonesia, 2(1).
- World Bank (2007). Spending for Development: Making the Most of Indonesia's New Opportunities – Indonesia Public Expenditure Review 2007. Jakarta: The World Bank Office.



World Bank (2009). Commodity Markets review. DECPG, World Bank. This can be accessed on: <http://decpg.worldbank.org>.

## Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada Menteri Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Rektor IPB, Senat Akademik IPB, Senat Akademik FEM-IPB, Dekan FEM-IPB, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Tim Penilai di Berbagai Jenjang, Direktur SDM-IPB dan Tenaga Kependidikan yang telah memproses pengangkatan saya, sehingga menjadi Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB sejak Desember 2007.

Penghargaan dan terimakasih saya sampaikan kepada Rektor IPB, Prof. Herry Suhardiyanto, Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Endang Suhendang dan Jajarannya, Para Wakil Rektor, Para Dekan, Panitia Orasi Ilmiah dan Panitia Dies Natalis IPB ke-46 atas terlaksananya Orasi Ilmiah hari ini.

Terimakasih saya haturkan kepada Prof. Affendi Anwar yang pada tahun 1988 sebagai Kepala Lab Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya mengusulkan saya kepada Prof. Sjafri Mangkuprawira sebagai Ketua Jurusan Sosek Pertanian waktu itu untuk diangkat sebagai staf pengajar di jurusan tersebut. Prof. Affendi Anwar dan Prof. Sjafri beserta Prof. Kuntjoro, Prof. Bunasor, Prof. Mangara Tambunan, Prof. Rudolf Sinaga, Prof. Bonar Sinaga, Prof. Roekasah, Prof. Sajogjo, Prof. S.M.P. Tjondronegoro, Prof. Sjafrida Manuwoto, Ir. Jajah Wagiono, M.Ec., Alm Ir. T. Hanafiah, M.A., dan pembimbing skripsi saya Alm Ir. Umar Tuanaya, M.A., semuanya secara langsung maupun tidak langsung telah banyak memberikan pengajaran yang baik kepada saya untuk menjadi staf pengajar yang tulus dan serius.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada Prof. Sitanala Arsjad, Prof. Justika Baharsyah, Prof. Ross Drynan dan lain-

lain yang pada tahun 1989 menetapkan saya sebagai salah satu dosen penerima beasiswa IDP/AIDAB untuk tugas belajar di *University of New England Australia*. Selama di UNE, saya memperoleh banyak ilmu pengetahuan terutama ekonometrika dari Prof. W.E. Griffiths serta makroekonomi dari Prof. Anis Chowdhury, dan penerapan kedua ilmu pengetahuan tersebut menjadi sebuah tesis M.Ec. dibimbing oleh Prof. Wayne Thomas dan Dr Chris O'Donnel. Merekalah yang secara formal menjadikan saya sebagai ekonom, dan untuk itu saya menyampaikan banyak terimakasih.

Saya juga berterimakasih kepada Pimpinan IPB yang pada tahun 1997 memberikan izin kepada saya untuk menempuh program *Ph.D. in economics* di Lincoln University, New Zealand. Saya dan keluarga jadi "selamat" dari terpaan Krismon, dan alhamdulillah kami dikaruniai seorang puteri di negara yang indah itu. Saya sangat berterimakasih kepada Bert D. Ward dan Amal Sanyal yang telah membimbing saya menyelesaikan Ph.D. thesis di Lincoln University dan meningkatkan ketertarikan profesional saya terhadap *business cycle* dan *macroeconometrics*. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Paul Dalziel yang menambah ketertarikan saya terhadap *macroeconomic policy*, dan kepada Richard Tay yang meningkatkan komprehensi mikroekonomi yang telah saya peroleh dari guru-guru saya di IPB, sehingga walaupun saya mendalami makroekonomi, mikroekonomi tetap saya pertahankan.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Chris Manning dan Ross McLeod dari the Indonesia Project, RSPAS, ANU, Canberra, Australia yang pada tahun 2001 memberikan saya kesempatan menulis makalah tentang ekspor dan menseminarkannya di sana. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Don Antiporta atas segala kerjasama dan dukungan yang telah diberikan ketika Beliau masih

menduduki jabatan penting di *FAO Regional Asia-Pacific di Bangkok*, demikian pula kepada Syed Saifullah di *FAO Roma*, dan Dr. Sangmu Lee di *FAO Korea Association* dan sebagai *President of the Asia Pacific Agricultural Policy Forum* di Seoul. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Satish Misra, yang darinya di *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* saya banyak belajar tentang bagaimana membawa pengetahuan teori ke tataran praksis dan advokasi kebijakan.

Terimakasih yang tulus saya haturkan kepada Dr. Joyo Winoto, yang darinya saya mendapatkan banyak pemahaman mengenai ekonomi politik serta komprehensi tentang kebijakan publik. Saya juga berterimakasih kepada Dr. Harianto, Prof. Endriatmo Soetarto, Dr. D.S. Priyarsono, dan rekan-rekan *Brighten Institute* atas pencerahan-pencerahan yang telah diberikan. Saya juga berterimakasih kepada Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Prof. Rudi Wibowo, para ketua yaitu Prof. Bustanul Arifin, Dr Arief Daryanto, Dr Bayu Krisnamurthi, dan Jajaran Pengurus yang tiada letih terus melakukan *exercises* pemikiran yang kiranya bisa memajukan pertanian dan mensejahterakan petani Indonesia. Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada Pimpinan Kementerian BUMN, yang telah memungkinkan saya menerapkan pengetahuan terbatas yang saya miliki di tataran praksis yaitu BUMN. Semua pengalaman yang saya peroleh memperkuat keyakinan saya mengenai keharusan *micro-based macroeconomic policy*.

Ungkapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para senior saya di tempat kami mengajar, Departemen Ilmu Ekonomi IPB, seluruh kolega pengajar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan semua staf kependidikan, atas kebersamaan, dukungan, dan pengertiannya sehingga suasana bekerja di sana terasa lebih nyaman. Terima kasih juga saya haturkan kepada Dr. Iman Sugema serta kolega peneliti dan administrasi di INTERCAFE IPB atas segala dukungan dan perhatian yang telah banyak diberikan, saya juga menghaturkan terimakasih

kepada Pimpinan MB-IPB yaitu Dr. Arief Daryanto, Prof. Ujang Sumarwan, dan Dr. Noer Azam Achsani, serta kepada para senior di sana terutama Prof. E.Gumbira Said, Prof. Syamsul Maarif, Dr. Arif Imam Soeroso, dan juga kepada para staf.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Prof. K.H. Didin Hafiduddin, Ustadz Abbas Aula, dan semua guru-guru agama yang sangat saya hormati yang telah membekali saya dengan ilmu agama Islam dan mudah-mudahan juga mendoakan kami. Terimakasih juga saya haturkan kepada Ibu dan Bapak guru SDN 65 Medan, Ibu dan Bapak guru SMPN 10 Medan, serta Ibu dan Bapak guru SMAN 7 Medan, yang tanpa mereka saya tidak mungkin bisa berada di sini.

Terimakasih saya sampaikan kepada Atasan, Kolega Pengelola, dan semua Staf—termasuk Asisten—kami yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, sejak kami menjadi pengelola di program pascasarjana Manajemen Pembangunan Daerah IPB, program pascasarjana Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan IPB, Bagian Ekonomi, Moneter, Perbankan dan Keuangan IPB, program pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB, serta Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan IPB atas kebersamaan dan kerjasama yang baik sehingga tugas-tugas berat terasa jadi lebih ringan.

Ucapan terimakasih yang tiada hingga saya sampaikan kepada ayahanda Alm Jauhari Siregar dan Ibunda Almh Siti Aman Harahap, yang telah mengajarkan prinsip-prinsip kejujuran, kerja keras, dan budi pekerti kepada kami anak-anaknya. Kepada Mertua yaitu Bapak Soewondo dan Ibu Hartatik, kami haturkan terimakasih sebesar-besarnya atas semua bantuan sejak awal kami menjadi menantunya, serta dorongan semangat dan doa-doanya.

Ucapan terimakasih yang tulus juga kami sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, Keluarga Kakak Almh Mariana Siregar, Keluarga Abang Sori Amal Siregar, Keluarga Kakak Darnisyah Siregar, Keluarga Kakak Zuraida Siregar, Keluarga Kakak Niswaini Siregar, Keluarga Abang Zulkarnain Siregar, Keluarga Kakak Netty Rumonda Siregar, serta seluruh Keponakan, atas dukungan, motivasi dan perhatian yang telah kami terima. Ucapan terimakasih yang tulus juga kami haturkan kepada iparku sekalian, Keluarga Mas dr. Nur Hidayat, Keluarga Mbak dr. Aida Fitriani, Keluarga Dik Ir. Ludy A. Fauzi, dan Keluarga Dik Novi atas dukungan, doa dan perhatiannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Soewarso, sahabat kami yang sudah seperti saudara sendiri.

Ungkapan terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada isteri tercinta, Ir Ayuda Fitriana, P.G.Dip.Comm. atas kasih sayang, ketulusan hati, dorongan semangat, pengorbanannya untuk tidak bekerja formal sehingga fokus kepada keluarga, dan doa-doanya yang membuat saya terus optimis menghadapi hari-hari yang sering harus diisi dengan tugas-tugas berat. Ungkapan sayang dan terimakasih juga disampaikan kepada anak-anak kami, Tifani Husna, Sarah Fauzia, Aisyah Amanda Hanif, dan Astrid Mariam Khairani Siregar, yang senantiasa membuat Ayah semangat menjalankan tugas-tugas, beribadah dan berdoa.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semuanya dengan pahala dan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, serta melindungi kita semua dari hal-hal yang menjauhkan kita dariNYA, amiin. Billa hit taufiq wal hidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

## Foto Keluarga



Dari kiri ke kanan: Hermanto Siregar, Ayuda Fitriana, Aisyah Amanda Hanif, Tifani Husna (merangkul) Astrid Mariam Khairani, dan Sarah Fauzia

## Riwayat Hidup

- Nama : Prof.Dr.Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.
- Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 05 Agustus 1963
- Kebangsaan : Indonesia
- Status : Berkeluarga, seorang isteri, Ir. Ayuda Fitriana, P.G.Dip.Comm. dan empat orang anak: Tifani Husna, Sarah Fauzia, Aisyah Amanda Hanif, dan Astrid Mariam Khairani Siregar
- Alamat Rumah : Jl. Mawar III/26, Taman Yasmin, Sektor 3, Bogor 16310, Indonesia
- Telp. : (0251) 8362762,
- HP : 0812 958 6498, 0812 110 9693
- Email : [hermansiregar@yahoo.com](mailto:hermansiregar@yahoo.com)
- Alamat Kantor : 1. Kantor Wakil Rektor bidang Sumberdaya & Pengembangan, Gd. Andi Hakim Nasoetion Lt.2, Kampus IPB, Darmaga, Bogor 16680.  
Telp. & Fax. (0251) 8622636.  
Email: [wrsp@ipb.ac.id](mailto:wrsp@ipb.ac.id)
2. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Wing Rektorat, Kampus IPB Dramaga, Bogor.

## Riwayat Pendidikan

1997-2001:

*PhD. (Doctor of Philosophy)* Ilmu Ekonomi, bidang keahlian *Macroeconometrics*  
Lincoln University, New Zealand



1990-1991:

M.Ec. (*Master of Economics*), bidang keahlian Ilmu Ekonomi Pertanian

The University of New England (UNE), Armidale, Australia

1989-1990:

DipAgEc. (*Diploma in Agricultural Economics*)

UNE, Armidale, Australia

1982-1986 :

Ir. (Sarjana Pertanian), bidang keahlian Agribisnis

Institut Pertanian Bogor, Bogor

### **Riwayat Pekerjaan**

2001–Sekarang

*Institut Pertanian Bogor, Bogor*

**Dosen Tetap dan Peneliti** pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM). Jabatan **Guru Besar Ilmu Ekonomi** diperoleh sejak Desember 2007.

1992–Sekarang

*Institut Pertanian Bogor, Bogor*

**Dosen Tetap serta Pembimbing** Tesis dan Disertasi pada Sekolah Pascasarjana

2002 – Sekarang

*Brighten Institute, Bogor*

**Direktur** bidang kajian ekonomi dan lingkungan

1988 – 2005

*Institut Pertanian Bogor, Bogor*

Dosen Tetap dan Peneliti pada Jurusan Ilmu-ilmu Sosial-Ekonomi Pertanian (Sosck), Fakultas Pertanian

### **Administrasi/Struktural**

Februari 2008 – sekarang

Institut Pertanian Bogor

Wakil Rektor bidang Sumberdaya & Pengembangan

2007 – Sekarang

Institut Pertanian Bogor

Kepala, Bagian/Laboratorium Ekonomi Moneter, Perbankan dan Keuangan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)

Oktober 2005 – April 2008

Institut Pertanian Bogor

Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Program Pascasarjana Manajemen & Bisnis

September 2003 – Oktober 2005

Institut Pertanian Bogor

Sekretaris, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah & Perdesaan (PWD), Sekolah Pascasarjana

2002-Juni 2004

Institut Pertanian Bogor

Anggota, Komisi Pengembangan dan Penjaminan Mutu (KPPM), FEM

Oktober 2001-Maret 2002

Institut Pertanian Bogor

**Sekretaris**, Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MPD), Sekolah Pascasarjana

1994-1996

Institut Pertanian Bogor

Sekretaris, Komisi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial-Ekonomi Pertanian (Sosek)

1992 – 1994

Institut Pertanian Bogor

Sekretaris, Laboratorium Ekonomi Pembangunan dan Wilayah, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial-Ekonomi Pertanian

## **Kekhususan**

Apr. 2007 – Jan. 2008

*PT. Permodalan Nasional Madani, Persero*

## **Komisaris Independen**

Januari 2008 – Sekarang

## **Komisaris Utama/ Independen**

2005 – Sekarang

**Anggota Tim Penasehat** Perundingan Perdagangan Internasional RI di WTO (SK Presiden RI No. 28/2005)

2006 – Agustus. 2008

**Anggota Tim Nasional** Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran (SK Presiden RI No. 10/2006)

Juni 2006 – April 2008

**Staf Khusus** Bidang Ekonomi & Politik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI)

2003

Anggota Tim Pakar Penyusunan Rencana Undang-undang No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden secara Langsung, Departemen Dalam Negeri, Jakarta

2003

Anggota Tim Pakar Penyusunan Naskah Akademis Instruksi Presiden tentang Kebijakan Restrukturisasi Industri Pergulaan Nasional, Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta (SK Menteri Pertanian RI)

2002 – Maret 2003

**Senior Agricultural Policy Analyst** pada *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR), UNDP, Jakarta

## **Penelitian dan Konsultasi (5 Tahun Terakhir)**

2008

Ketua Tim dalam studi “Challenge to Current Agricultural Development in Indonesia: Competition between Biofuel and Food Security”, Kerjasama Brighten Institute dengan FAO-Korea Association, Seoul

2007 – 2008

Tenaga Ahli Makroekonomi dalam studi “Persistensi Pengangguran dalam Perekonomian Indonesia”, Kerjasama InterCAFE (*International Center for Applied Finance and Economics*) IPB dan PPSK-Bank Indonesia, Jakarta

2006–2008

Ketua Tim dan Ahli Ekonomi Keuangan dalam studi “*Model Kemitraan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Lidah Buaya (Aloe vera L.) di Kabupaten Bogor*”, dibiayai oleh Departemen Pendidikan Nasional, melalui Program Hibah Bersaing, Jakarta

2007

Tenaga Ahli Pemodelan Ekonomi/Ekonometrika dalam Studi “*Leading Indicators Sektor Keuangan*”, Kerjasama InterCAFE IPB dan Bank Indonesia, Jakarta

2006-2007

Ketua Tim dan Tenaga Ahli Makroekonomi dalam studi “*Paradoks Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi*”, Kerjasama InterCAFE IPB dan PPSK-Bank Indonesia, Jakarta

2005-2006

Ketua Tim dan Tenaga Ahli Makroekonomi dalam studi “*Dampak Otonomi Daerah terhadap Kinerja Keuangan dan Perekonomian Daerah*”, Kerjasama InterCAFE IPB dan PPSK-Bank Indonesia, Jakarta

2004-2005

Ketua Tim dan Tenaga Ahli Pemodelan Ekonomi/Ekonometrika dalam studi “*Indonesian Food and Agricultural Policy Simulation*”, Kerjasama Brighten Institute dan FAO, *Regional Office for Asia and the Pacific*, Bangkok

2004

Tenaga Ahli Makroekonomi dalam studi "*The Impact of Fiscal Policy on Indonesian Macroeconomic Performance, Agricultural Sector, and Poverty Incidence: A Dynamic Computable General Equilibrium Analysis*", dibiayai oleh *Poverty Economic Policy (PEP) Network*, Canada

2004-2007

Narasumber pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta

2003-2004

Tenaga Ahli Makroekonomi dalam studi "Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Daerah", dibiayai oleh Departemen Pendidikan Nasional, melalui program Hibah Pasca, Jakarta

2003

Tenaga Ahli Ekonometrika dalam studi "*Fiscal Sustainability Through Public Debt Management*", Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang, dibiayai oleh JICA, Jepang

2003

Tenaga Ahli Ekonometrika dalam studi "*Log Supply Capacity*", Kerjasama Departemen Kehutanan dan *International Timber Trade Organization (ITTO)*, dibiayai oleh ITTO, Jepang

2003

Narasumber pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta

## Publikasi

### Jurnal Ilmiah

- Sugiyanto, Siregar, H., dan Soetarto, E. (2008), "Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Kota Depok", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 5(2), 64-72.
- Siregar, H., Widyastutik, Mulyati, H. (2008), "Usaha Kecil Lidah Buaya di Kabupaten Bogor: Sebuah Analisis Sosial-Ekonomi dan Lingkungan", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 5(1), 33-39.
- Rindayanti, W., Siregar, H., dan Hutagaol, M.P. (2007), "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan di Wilayah Propinsi Jawa Barat", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 4(2), 103-113.
- Siregar, H. dan Sukwika, T. (2007), "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pasar Tenaga Kerja dan Implikasi Kebijakan-nya terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor", *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(3).
- Yulismi and Siregar, H. (2007), "Determinant Factors of Indonesia Palm Oil Export to Major Importing Countries: An Error Correction Model Analysis", *Economics and Finance in Indonesia*, 55(1), 65-88.
- Siregar, H. (2007), "Elasticities of Output Supplies and Input Demand of Indonesian Foodcrops and Their Policy Implications: Multi-Input Multi-Output Framework", *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(2).
- Hutagaol, R.B.T.M., Daryanto, A., and Siregar, H. (2007), "An Analysis of Brunei Darussalam's Plastic Furniture Market", *Business and Entrepreneurial Review*, 6(2), 101-106.
- Ilham, N. and Siregar, H. (2007), "Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Makro", *Jurnal Agroekonomi*, 25(1), 55-83.

- Siregar, H. (2006), "Food Crops Productions and Their Business Implication", *Business and Entrepreneurial Review*, 5(2), 147-152.
- Ilham, N., Siregar, H., dan Priyarsono, D.S. (2006), "Efektivitas Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan", *Jurnal Agroekonomi*, 24(2).
- Usman, Siregar, H., dan Sinaga, B.M. (2006), "Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, dan Desentralisasi Fiskal: Analisis Simulasi Model Ekonometrika", *Bisnis dan Ekonomi Politik*, 7(4), 9-44.
- Siregar, H. (2006), "Social-economic Reasons to Soil Conservation: An Econometric Analysis on Cross-sectional Lore Lindu Data", *Jurnal Agroekonomi*, 24(1).
- Pranoto, S., Ma'arif S., Sutjahjo, S.H., dan Siregar, H. (2006), "Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan melalui Model Pengembangan Agropolitan", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(1).
- Nuryati, Y., Siregar, H., dan Ratnawati, A. (2006), "Dampak Kebijakan *Inflation targeting* terhadap Beberapa Variabel Makro-ekonomi di Indonesia", *Bulletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan*, 9(1), 113-134.
- Siregar, H. (2006), "Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja", *Bisnis dan Ekonomi Politik*, 7(2), 29-45.
- Usman, Sinaga, B.M., dan Siregar, H. (2006), "Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 6(3).
- Saefudin, Sinaga, B.M., dan Siregar, H. (2006), "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian dan Kelembagaan Provinsi Riau", *Forum Pascasarjana*, 29(1), 53-64.
- Winoto, J. dan Siregar, H. (2006), "Peranan Pembangunan Infrastruktur dalam Menggerakkan Sektor Riil", *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 2(1).

- Siregar, H. and Daryanto, A. (2005), "Perkembangan dan Diversifikasi Ekspor Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 2(2), 157-166.
- Riyanto dan Siregar, H. (2005), "Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Antarwilayah", *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 1(1), 15-35.
- Widyantoro, B., Siregar, H., Sanim, B., dan Priyarsono, D.S. (2005), "Ekonomi Industri Pulp dan Kertas Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan dan Tekanan Internasional", *Forum Pascasarjana*, 28(4), 285-295.
- Bafadal, A., Ratnawati A., Tambunan, M., dan Siregar, H. (2005), "Dampak Utang Pemerintah terhadap Stabilitas Makroekonomi", *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 1(2), 47-62.
- Rubiansyah, M., Anwar, A., dan Siregar, H. (2005), "Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah", *Forum Pascasarjana*, 28(3), 231-248.
- Priyarsono, D.S., Siregar, H., and Becke, J. (2005), "The Prospect of Agribusiness in the Indonesian Economy", *Business and Entrepreneurial Review*, 5(1), 19-36.
- Anwar, C., Gonarsjah, I., Siregar, H., dan Honggokusumo, S. (2005), "Posisi Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional: Suatu Analisis Integrasi Pasar", *Forum Pascasarjana*, 28(1), 61-74.
- Siregar, H., Shohib, H. and Hermansah, T. (2004), "Farm Credit Institution in Indonesia: Lessons Learnt from the Failure of KUT and KUD", *Mimbar Sosek: Journal of Agricultural and Resource Social-Economics*, 17(3), 1-10.
- Chowdhury, A. and Siregar, H. (2004), "Indonesia's Monetary Policy Dilemma—Constraints of *Inflation targeting*", *Journal of Development Areas*, 37(2), 137-153.



- Nuryati, Y. dan Siregar, H. (2004), "Pelaksanaan Kebijakan Moneter *Inflation targeting* di Indonesia", *Dinamika Ekonomi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(2), 181-195.
- Siregar, H. (2004), "Changes in Farmer Terms of Trade and Agricultural Net-Barter Terms of Trade: An Empirical Analysis", *Journal of Management and Agribusiness*, 1(1), 1-19.
- Romdhon, M.M. and Siregar, H. (2004), "Dayasaing Industri Kecil Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas: Analisis Matriks Analisis Kebijakan dan Opsi Kelembagaan", *Mimbar Sosek: Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian*, 17(2), 97-114.
- Kolopaking, L.M., Siregar, H., dan Nawireja, I.K. (2003), "Telaah Sosial-Ekonomi Usahatani Kapas Bt: Temuan Awal Dari Provinsi Sulawesi Selatan", *Mimbar Sosek: Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian*, 16(2), 78-95.
- Sawit, M.H., Erwidodo, Kuntohartono, T. dan Siregar, H. (2003), "Penyehatan dan Penyelamatan Industri Gula Nasional", *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(3), 192-209.
- Siregar, H. and Ward, B. (2002), "Were Aggregate Demand Shocks Important in Explaining Indonesian Macro-Economic Fluctuations?", *Journal of the Asia Pacific Economy*, 7(1), 35-60.
- Siregar, H. and Ward, B. (2001), "Long Run Money Demand, Long Run IS Functions and Indonesian Macroeconomic Fluctuations", *Economia Internazionale*, 64(3), 401-424.
- Siregar, H. and Ward, B. (2001), "Sources of Fluctuations in the Indonesian Macroeconomy: an application of a simple structural VAR Model", *Singapore Economic Review*, 45(1), 73-98.

### **Book / Book Chapter**

- Siregar, H. (2009), *Makro-Mikro Pembangunan: Kumpulan Makalah dan Esai*. IPB Press, Bogor.
- Wibowo, R., Siregar, H., dan Daryanto, A. (2008), *Mungkinkah Petani Sejahtera?*, PERHEPI dan Brighten Press, Bogor.
- Achsani, N.A. and Siregar, H. (2007), "Financial and Economic Integration : Experience of the EU and Future Prospect for ASEAN+3", Chapter 10 in L. Dong and G. Heiduk (eds), *The EU's Experience in Integration : A Model for ASEAN+3?*. Peter Lang, Bern and Berlin.
- Siregar, H. Widyastutik, dan Thamrin, F.H. (2007), *Ekonomi Perencanaan*, UT Press, Puslata UT, Tangerang, Banten.
- Siregar, H. dan Fitriani Y. (2006), "Pancasila dan Problema Keadilan Sosial-Ekonomi di Indonesia", *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Brighten Press, Bogor.
- Siregar, H. and Ward, B. (2002), "Can Monetary Policy/Shocks Stabilize Indonesian Macroeconomic Fluctuations?", Chapter 6 in A.H.H. Tan (ed.), *Monetary and Financial Management in Asia in the 21<sup>st</sup> Century*. World Scientific, New Jersey.
- Siregar, H. (1995), *Book of Reading for Agricultural Planning*, Indonesia-Australia Eastern Universities Project (Code No.: 05.016.95), Ditjen Dikti-Depdikbud dan AIDAB, Jakarta.
- Siregar, H. and Weatherford, J. (1995), *Exercise Book: Manual to Computer Sessions for Agricultural Planning*, Indonesia-Australia Eastern Universities Project (Code No.: 05.024.95), Ditjen Dikti-Depdikbud dan AIDAB, Jakarta.

### **Seminar/ Workshop (3 Tahun Terakhir)**

- Siregar, H. dan Wibowo, R. (2009), "Peran Ilmu Ekonomi Pertanian dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian Pada Era Globalisasi", *Seminar Nasional oleh PERHEPI Sulawesi Utara: In Search of*

*Agricultural Development Strategy and Policy*, Bank Indonesia  
Manado, 28-29 September.

- Siregar, H. (2009), "Alternatif Program Penguatan Usaha Mikro dalam Upaya Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran", *BAPPENAS Serial Discussion: Pemberdayaan Usaha Mikro 2010-2014*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 19 Mei.
- Siregar, H. (2008), "Problems Facing the Indonesian Economy and Current Policy Responses for Agriculture", *The 33<sup>rd</sup> Annual Conference of Federation of ASEAN Economists Association*, Hanoi Vietnam, 27 November.
- Siregar, H. and Arifin, B. (2008), "Challenges for Sustainable Agricultural Biotechnology Development in Indonesia", *The 6<sup>th</sup> ASAE International Conference: The Asian Economic Renaissance, What Is In It for Agriculture*, Manila, 28-29 August.
- Siregar, H. (2008), "Makroekonomi, Proyeksi Ekonomi, serta Iklim Usaha dan Prospek Bisnis Indonesia", Bahan Presentasi disajikan pada Workshop *Wirausaha Muda Mandiri 2008*, diselenggarakan oleh Bank Mandiri di Hotel Grand Angkasa, Medan, 10 April.
- Siregar, H. (2008), Resource Person for *The 5<sup>th</sup> Policy Roundtable on Building Capacities for Agricultural Competitiveness of Transition Countries in Southeast Asia: Biofuels Development, Challenges and Implications to Food Security in Transition Southeast Asia*, organized by SEARCA and FAO-RAP, Nay Pyi Taw, Myanmar, 1-2 April.
- Siregar, H. (2008), Resource Person (Regional Advisory Group) for *Regional Consultation Meeting: Pro-poor Policy Formulation, Dialogue and Implementation at the Country Level*, organized by FAO-RAP and IFAD, Bangkok, 4-5 March.
- Siregar, H. (2007), "Prospek Ekonomi Indonesia 2008", Bahan Presentasi disajikan pada Seminar *Indonesian Economic Outlook 2008*, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa

Ekonomi Studi Pembangunan IPB di IPB International Convention Center, Bogor, 12 Desember.

Siregar, H. (2007), "Suatu Perspektif Ekonomi-Politik terhadap Kebijakan Penilaian Tanah dan Aset Pertanahan", Bahan Presentasi disajikan pada *Workshop Nasional Politik, Arah, dan Kebijakan Penilaian Tanah dan Aset Pertanahan*, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, 28 November.

Siregar, H. (2007), "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional: *The Triple Track Strategy*", Makalah disajikan pada Seminar Nasional *Strategi Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kerangka Kebijakan Ekonomi Nasional*, diselenggarakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Hotel Garuda Plaza, Medan, 7 November.

Siregar, H. (2007), "Pentingnya Upaya Pendekatan Layanan Publik Pemerintah dalam Hal Sertifikasi Tanah: Perspektif Ekonomi-Politik", diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UKSW di Auditorium UKSW, Salatiga, 23 Oktober.

Siregar, H. and Arifin, B. (2007), "Workplan for A Country Assessment Study on Biofuel Development and Potentials", Bahan Presentasi disajikan pada *Workshop on Bioenergy*, diselenggarakan oleh SEARCA di Renaissance Hotel, Makati, Metro Manila – Philippines, 8 Oktober.

Siregar, H. (2007), "RAPBN 2008 dan Kebijakan Belanja Daerah", Bahan Presentasi disajikan pada Seminar *RAPBN dan Perekonomian Indonesia 2008*, diselenggarakan oleh The Asian Foundation di Hotel Mulia, Jakarta, 27 September.

Siregar, H. dan Wahyuniarti, D. (2007), "Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", Makalah disajikan pada Seminar Nasional *Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan*, diselenggarakan oleh Departemen Pertanian di Pusat Analisis Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 21 Agustus.

Siregar, H. (2007), "Critical Problems in the Indonesian Economy

and the Most Needed Policies”, Bahan Presentasi disajikan pada *Prof. Stiglitz Public Lecture*, diselenggarakan oleh Tempo, Penerbit Mizan, dan Brighten Institute di Hotel Four Seasons, Jakarta, 14 Agustus.

Winoto, J. dan Siregar, H. (2007), “Dinamika Penggunaan Lahan Pertanian, Kaitannya dengan Kesejahteraan Petani dan *Global Warming* : Peran Ilmu Ekonomi Pertanian?”, Makalah disajikan pada *Konperensi Nasional PERHEPI Ke-15* di Hotel Sahid Raya, Solo, 4 Agustus.

Siregar, H. (2007), “Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues, and Policies”, Makalah disajikan pada Policy Workshop *ASEAN Economic Renaissance: Challenges and Consequences on Agriculture, Food Security, and Poverty*, diselenggarakan oleh FAO dan SEARCA di Chiang Mai – Thailand, 19 Maret.

Siregar, H. (2006), “Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Dayabeli Masyarakat Kabupaten Bogor”, Makalah disajikan pada *Seminar Forum Komunikasi Lintas Institusi Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Bogor*, diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Bogor di Gedung Bappeda Kabupaten Bogor, Cibinong, 13 Desember.

Siregar, H. (2006), “Dukungan Fiskal untuk Lahan Pertanian Abadi”, Bahan Presentasi disajikan pada Seminar *Kebijakan Penyediaan Lahan Pertanian Abadi dan Pengurangan Konversi Lahan Pertanian*, diselenggarakan oleh Kantor Menko Perekonomian dan P4W IPB di Kampus IPB Baranang Siang, Bogor, 11 Desember.

Siregar, H. (2006), “Skema Kebijakan Keuangan untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Agraria Nasional”, Bahan Presentasi disajikan pada Simposium Agraria Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Hotel Tiara, Medan, 15 November.

Siregar, H. (2006), “Kinerja dan Daya saing Sektor Industri”, Bahan Presentasi disajikan pada Seminar Peluang, Tantangan, dan

and the Most Needed Policies”, Bahan Presentasi disajikan pada *Prof. Stiglitz Public Lecture*, diselenggarakan oleh Tempo, Penerbit Mizan, dan Brighten Institute di Hotel Four Seasons, Jakarta, 14 Agustus.

Winoto, J. dan Siregar, H. (2007), “Dinamika Penggunaan Lahan Pertanian, Kaitannya dengan Kesejahteraan Petani dan *Global Warming* : Peran Ilmu Ekonomi Pertanian?”, Makalah disajikan pada *Konperensi Nasional PERHEPI Ke-15* di Hotel Sahid Raya, Solo, 4 Agustus.

Siregar, H. (2007), “Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues, and Policies”, Makalah disajikan pada Policy Workshop *ASEAN Economic Renaissance: Challenges and Consequences on Agriculture, Food Security, and Poverty*, diselenggarakan oleh FAO dan SEARCA di Chiang Mai – Thailand, 19 Maret.

Siregar, H. (2006), “Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Dayabeli Masyarakat Kabupaten Bogor”, Makalah disajikan pada *Seminar Forum Komunikasi Lintas Institusi Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Bogor*, diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Bogor di Gedung Bappeda Kabupaten Bogor, Cibinong, 13 Desember.

Siregar, H. (2006), “Dukungan Fiskal untuk Lahan Pertanian Abadi”, Bahan Presentasi disajikan pada Seminar *Kebijakan Penyediaan Lahan Pertanian Abadi dan Pengurangan Konversi Lahan Pertanian*, diselenggarakan oleh Kantor Menko Perekonomian dan P4W IPB di Kampus IPB Baranang Siang, Bogor, 11 Desember.

Siregar, H. (2006), “Skema Kebijakan Keuangan untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Agraria Nasional”, Bahan Presentasi disajikan pada Simposium Agraria Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Hotel Tiara, Medan, 15 November.

Siregar, H. (2006), “Kinerja dan Daya Saing Sektor Industri”, Bahan Presentasi disajikan pada Seminar Peluang, Tantangan, dan

Kebijakan Pengembangan Industri, diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian RI di Gedung Depperin, Jakarta, 19 September.

Siregar, H. (2006), “Perspektif Model *Agro-Based Cluster* Menuju Peningkatan Daya Saing Industri”, Makalah disajikan pada Seminar *Meningkatkan Daya Saing Industri Indonesia: Masalah dan Tantangan* dalam rangka Pameran Produksi Indonesia, yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian, di Gedung Pusat Niaga Lt. 6 Arena PRJ Kemayoran, Jakarta, 8 Agustus.

Siregar, H. (2006), “Paradoks Pengangguran dan Pertumbuhan”, Makalah disajikan pada Seminar *Pemecahan Non-Konvensional Masalah Pengangguran*, diselenggarakan oleh ISEI Cabang Bogor Raya di Kampus MB-IPB, Bogor, 27 Juli.

Siregar, H. (2006), “Transformasi Struktural, Industrialisasi dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, Makalah disajikan pada *Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XVI*, diselenggarakan oleh ISEI di Manado Convention Centre, Manado, 19 Juni.

Siregar, H. (2006), “Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Sistem Agribisnis yang Tangguh: Pentingnya Peranan Pemerintah Daerah dan Swasta”, Bahan Presentasi disajikan pada *Kuliah Umum Program Pascasarjana Magister Manajemen Agribisnis* di Universitas Medan Area, Medan, 10 Juni.

Siregar, H. (2006), “Paradoks Pertumbuhan – Pengangguran : Penyebab dan Solusi”, Bahan Presentasi disajikan pada *Focus Group Discussion Perkembangan Makroekonomi Indonesia*, diselenggarakan oleh Direktorat Makroekonomi BAPPENAS di Ruang Rapat BAPPENAS, Jakarta, 2 Juni.

Siregar, H. (2006), “Pandangan terhadap Perjanjian Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian serta RUU-nya”, Bahan Presentasi disajikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum, diselenggarakan oleh Komisi IV DPR-RI di Gedung DPR, Jakarta, 15 Februari.

- Siregar, H. dan Suhendi (2006), "Usahatani Cengkeh, Industri Rokok, dan Kebijakan Kenaikan Harga Jual Eceran Rokok", Makalah disajikan pada Semiloka *Penanganan Permasalahan Percengkehan di Indonesia*, diselenggarakan oleh Pemda Sulawesi Utara di Hotel Nikko, Jakarta, 9 Februari.
- Siregar, H. (2006), "Seputar Masalah Perberasan Nasional", Bahan Presentasi disajikan pada Diskusi *All IPB Rice Summit*, diselenggarakan oleh Himpunan Alumni IPB di AKP-Kampus IPB Baranang Siang, Bogor, 28 Januari.
- Siregar, H. (2006), "Arah Penyelenggaraan Matakuliah Kebankentralan di IPB", Bahan Presentasi disajikan pada Semiloka *Evaluasi Pelaksanaan Matakuliah Kebankentralan di Perguruan Tinggi*, diselenggarakan oleh PPSK Bank Indonesia di Parapat, 18 Januari.

### **Populer / Ilmiah-Populer**

- Siregar, H. (2008), "Bahaya Rendahnya Harga Komoditas Pertanian", *Suara Pembaruan*, 28 Oktober.
- Siregar, H dan Masyitho, S. (2008), "Krisis Finansial Global dan Implikasinya pada Sektor Agribisnis Indonesia 2009", *Agrimedia*, 15(2), 12-20.
- Siregar, H. (2007), "Mengapa Pengembangan UMKM Sangat Diperlukan Guna Menggerakkan Sektor Riil?", *Eksekutif*, Juni, 334.
- Siregar, H. (2007), "Peningkatan Dayabeli Masyarakat: Mengapa Diperlukan dan Bagaimana Mewujudkannya", *Eksekutif*, Januari, 329.
- Siregar, H. (2006), "Perspektif Model Agro-Based Cluster Menuju Peningkatan Daya saing Industri", *Agrimedia*, 11(2).
- Sinaga, R.H. dan Siregar, H. (2006), "Cukup Berdayasaingkah Minyak Sawit Indonesia di China?", *Agrimedia*, 11(2).
- Siregar, H., Harianto, dan Achsan, N.A. (2006), "Analisis Usahatani dan Skala Usaha Tanaman Jarak", *Agrimedia*, 11(1).



- Siregar, H. dan Nely (2005), "Infrastruktur Dasar dan Pembiayaannya", *Agrimedia*, 10(2), 26-37.
- Siregar, H. (2005), "Persoalan Impor Beras Indonesia", *Eksekutif*, Oktober, 314, 48-49.
- Siregar, H. (2005) "Kerawanan Pangan dan Upaya Penanggulangan", *Eksekutif*, Juli, 311, 50-52.
- Siregar, H. (2005) "Penurunan Kesejahteraan Petani dan Perlunya Mengatasi Kendala Infrastruktur", *Eksekutif*, Mei, 309, 42-43.
- Siregar, H. (2004), "*Trend* Produk-produk Industri Kehutanan Indonesia dan Implikasinya", *Agrimedia*, 9(1), 46-53.
- Siregar, H. dan Kolopaking, L.M. (2003), "Semakin Membbaikah Kinerja Pertanian Kita Setelah Krisis?: Analisis Ringkas Berdasarkan Indikator-Indikator Agregat", *Agrimedia*, 8(2), 8-15.

### **Keanggotaan Profesional dan Penghargaan**

2004 – sekarang

**Pengurus Pusat**, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia ("PERHEPI")

Okt.2007– sekarang

**Sekretaris Jenderal**, PERHEPI

Sep.2009 – sekarang

**Pengurus**, ISEI Pusat

2006 – sekarang

**Pengurus**, ISEI, Cabang Bogor Raya

2003 – sekarang

**Anggota**, *Asia Pacific Agricultural Policy* (APAP) Forum, Seoul, Korea Selatan

Mar.2007-sekarang

**Secretary General**, APAP Forum, Korea Selatan

Okt.2007 – sekarang

**Anggota**, Forum Masyarakat Statistik Republik Indonesia  
(SK Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala  
BAPPENAS RI)

2003 – sekarang

**Associate Fellow**, *Asia-Pacific Policy Center*, Manila,  
Philippines

2000 – 2002

**Anggota**, *The Econometric Society*, Amerika Serikat

1989–1991

**Anggota**, Australian Agricultural Economic Society (AAES),  
Australia

1989–1991

**Receipient**, IDP/AIDAB *scholarship* – Australia

1997–2000

**Award Holder**, NZODA *study award* – New Zealand

Juli – Agustus 2001

**Visiting Scholar**, Grant dari the Indonesia Project,  
*The Australian National University (ANU)*, RSPAS  
(Research School of Pacific-Asia Studies), Economics  
Division, ANU, Canberra, Australia

### **Hingga sekarang**

- **Referee** untuk: *Journal of the Asia Pacific Economy* (sejak 2002), *ASEAN Economic Bulletin* (sejak 2002), *Mimbar Sosek - Journal of Agricultural Social-Economics* (sejak 2001), dan *Journal of Management & Agribusiness* (sejak 2004);
- **Reviewer** Proposal Penelitian dan Karya Ilmiah pada Pusat Studi Sosial-Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian (sejak 2004); pada Puslitbang Sosial-Ekonomi Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan

Kehutanan, Departemen Kehutanan (sejak 2005 hingga 2006); dan pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia (sejak 2007).

- **Editor** pada *Journal of Management & Agribusiness* (sejak 2004), dan pada *Agrimedia* (sejak 2005).

1998 – 1999 **President**, Lincoln University Moslem Society, New Zealand (NZ)

1998 – 1999

**Wakil Ketua**, PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia), Christchurch, NZ

1999–2000

**Secretary General**, Moslem Association of Canterbury Province, NZ